

**PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DENGAN
MEMBANGUN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT BERBASIS
KELOMPOK ARISAN RT DI DESA DEPOK KECAMATAN BENDUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos.)**



Oleh :

NINA AWALIA SAFITRI
NIM. B92213066

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

JURUSAN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2017

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nina Awalia Safitri

NIM : B92213066

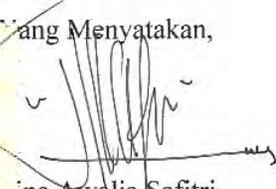
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat : Perum. Alam Gunung Anyar Timur II Blok E No. 4, Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi maupun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 4 Juli 2017

Yang Menyatakan,

Nina Awalia Safitri
NIM.B92213066



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nina Awalia Safitri
NIM : B92213066
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : **Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Dengan
Membangun Kesiapsiagaan Berbasis Kelompok Arisan RT
di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten
Trenggalek**

Skripsi disetujui pembimbing untuk di uji pada sidang skripsi Prodi Pengembangan
Masyarakat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 04 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Drs. Abd. Mudjib Adnan, M.Ag.
NIP. 195902071989031001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Nina Awalia Safitri ini telah diujikan dan dapat dipertahankan di
depan penguji pada tanggal 20 Juli 2017, di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Mengesahkan,

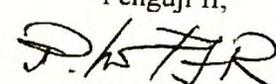
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Penguji I,

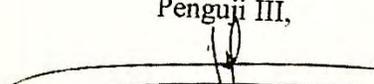
Drs. H. Abd. Muji Adnan, M.Ag
NIP. 195902071989031001

Penguji II,



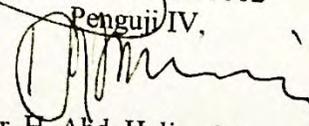
Dra. Pudji Rahmawati, M.Kes
190703251994032002

Penguji III,



Drs. Agus Afandi, M. Fil.I
19661106199831002

Penguji IV,



Dr. H. Abd. Halim, M. Ag
196307251991031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nina Awalia Safitri
NIM : B92213066
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan Masyarakat Islam
E-mail address : ninaawalia65@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DENGAN MEMBANGUN

KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK ARISAN RT DI DESA

DEPOK KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK

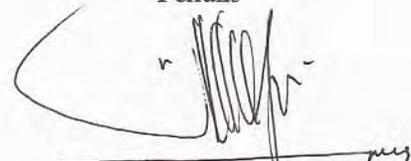
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2017

Penulis



(Nina Awalia Safitri)

kemiringan lereng sebesar $16^{\circ} - 55^{\circ}$ (30% - 70%) yang membuat desa ini rentan terjadi tanah longsor.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana Internasional dari *fatalistic responsive* yang terorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadi bencana, menuju kepada *proactive preparedness* yang penanggulangan bencana dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial. Perubahan ini membawa dampak terhadap perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagai respon positif telah lahir Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana serta kejelasan peran Kementerian Sosial sebagai salah satu sektor penanggulangan bencana di bidang bantuan sosial.

Sayangnya, paradigma *fatalistic responsive* yang terorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadi bencana, menuju kepada *proactive preparedness* dimana penanggulangan bencana dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial belum dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama masyarakat Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Hal ini terjadi karena belum adanya kelompok dan lembaga yang aktif dalam mempromosikan *proactive preparedness* di masyarakat.

Faktor pendidikan yang rendah dan pendapatan yang tidak merata menyebabkan tingginya kerentanan masyarakat desa, sehingga turut menyumbang pada peta kerawanan, dengan diukur berdasarkan tingginya jumlah penduduk,

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerentanan masyarakat Desa Depok dalam menghadapi bencana tanah longsor ?
2. Bagaimana strategi pendampingan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor kerentanan masyarakat Desa Depok dalam menghadapi bencana tanah longsor.
2. Untuk mengetahui strategi pendampingan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam beberapa hal seperti berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai tambahan referensi tentang pengetahuan yang berkaitan dengan kebencanaan perspektif Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. dan sebagai tugas akhir perkuliahan di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal informasi penelitian sejenis. Dapat pula dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai pengurangan risiko

mempermudah pembaca dalam memahami secara ringkas tentang rangkaian dan penjelasan mengenai isi BAB per BAB.

Pada BAB II ini peneliti membahas tentang teori-teori yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat, serta konsep-konsep dan pola pendampingan dalam pengurangan risiko bencana, khususnya bencana tanah longsor. Diantaranya adalah pedoman pengurangan risiko bencana di dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012. Serta pengurangan risiko bencana kaitannya dengan islam dan komunitas tangguh bencana.

Di dalam BAB ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang di gunakan sebagai pendekatan, prosedur, teknik pengumpulan data, teknik validasi data dan teknik analisa data yang telah di gunakan. Dalam mengurai masalah kebencanaan sebagai masalah social secara kritis dan mendalam berdasarkan temuan-temuan masalah secara *real* di lapangan bersama masyarakat (*partisipatoris*). Hingga membangun proses pengorganisasian masyarakat berbasis kemampuan dan kearifan lokal yang tujuannya adalah transformasi social kearah yang lebih baik.

Pada BAB IV, peneliti memberikan gambaran umum realitas mengenai lokasi penelitian. Pemaparan tentang data-data geografis, demografi, kondisi sosial masyarakat seperti sejarah desa, kegiatan ekonomi, social budaya dan keagamaan hingga pendidikan masyarakat serta gambaran kesehatan dan kebencanaan yang dihimpun dari analisis sistem informasi Geospasial (*GIS*), Profil Desa Depok dan wawancara-wawancara dengan masyarakat lokal sebagai penguat data. Sehingga

fungsi ini sangat mendukung tema yang diangkat terutama masalah kebencanaan yang ada di Desa.

Pada BAB V ini peneliti menguraikan dan memaparkan tentang realita dan fakta-fakta yang ditemukan mengenai kebencanaan. Dari segi lingkungan yang rawan terhadap bahaya dan ancaman bencana. Masyarakat yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok rentan. Serta peran pemerintah dalam isu kebencanaan yang tidak maksimal. Hal ini akan mempengaruhi pada strategi apa yang akan dilakukan sebagai upaya pemecaha masalah.

Dalam BAB VI ini peneliti memaparkan tentang proses aksi pendampingan ditingkat penyadaran manusia, dengan kampanye tentang PRB, pemasangan rambu untuk waspada longsor di titik atau kawasan rawan longsor. Kemudian membangun kelembagaan dengan terbentuknya kelompok tangguh bencana desa. Hingga advokasi kebijakan pada pemerintah desa untuk menganggarkan APBDes serta mengawal kelompok tangguh bencana hingga legal dengan SK kepala desa. Semua kegiatan di atas dilakukan secara partisipatif dengan komunitas. Hal tersebut merupakan jawaban atas masalah yang di temukan di BAB IV.

Pada BAB VII ini peneliti sajikan bagaimana akhir dari penelitian yang dilakukan. Menjawab keberhasilan atas aksi penyelenggaraan pendidikan dengan kampanye PRB, pembentukan kelompok tangguh bencana berbasis kelompok arisan RT dan advokasi kepada pemerintah desa. Serta menampilkan beberapa tabel sebagai alat ukur keberhasilan dan kenampakan masyarakat sebelum pendampingan dan setelah pendampingan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar keberhasilan dan perubahan yang dialami masyarakat atas strategi yang di jalankan

selama proses penelitian dan pendampingan selama empat bulan di lokasi pendampingan.

Peneliti dalam BAB VIII ini membuat sebuah catatan refleksi atas penelitian dan pendampingan dari awal hingga akhir. Mulai dari merubah paradigma dan kesadaran masyarakat atas bencana yang terjadi di lingkungannya. Pentingnya mereduksi dampak bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga berubah pula pola perilaku masyarakat yang sebelumnya menanggulangi bencana secara responsif menjadi lebih preventif. Hingga merubah sikap dan pola perilaku menghadapi bencana yang menganggap selama ini bencana adalah musibah menjadi bencana adalah suatu peringatan untuk masyarakat, sesuai dengan bencana dilihat melalui perspektif Al-Qur'an.

Pada BAB IX terakhir dalam penelitian ini, peneliti membuat kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dari bagaimana kondisi masyarakat depok dalam menghadapi bencana tanah longsor. Faktor kerentanan lingkungan, pola kehidupan masyarakat hingga faktor pemangku kebijakan yang belum menuangkan upaya PRB dalam program kerja pemerintah desa. Hingga, Menawarkan strategi pendampingan dengan membuat system peringatan dini dan kearifan lokal lainnya hingga mengadvokasi terbentuknya kelompok tangguh bencana desa dengan legal dan di perkuat dengan SK kepala desa. Membangun jejaring dengan stakeholder terkait, bekerjasama menjadikan desa siaga bencana. Dan membuat beberapa saran agar ditindaklanjuti, dan sebagai informasi tambahan.

terpaan bahaya dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon dan pemulihan dan dengan demikian dapat memperkuat ketangguhan.

Sedangkan beberapa target yang ingin dicapai dengan penerapan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030 antara lain mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 2020-2030 jika dibandingkan dengan periode 2005-2015. Secara substansial mengurangi jumlah korban yang terkena dampak secara global di tahun 2030, bertujuan menurunkan angka rata-rata global per 100.000 di dekade 2020-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015. Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan produk domestik bruto (GDP) di tahun 2030.

Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pembangunan ketangguhan mereka pada tahun 2030. Secara substansial meningkatkan jumlah Negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan local pada tahun 2030. Meningkatkan kerja sama internasional secara substansial untuk Negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan kerangka kerja ini di tahun 2030. Dan secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke system peringatan dini multi-

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN AKSI PARTISIPATIF

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory action research* (PAR). PAR adalah sebuah konsep penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik¹⁰². Tidak ada definisi baku mengenai apa yang dimaksud dengan PAR, namun para ahli diantaranya Yoland Wadworth mengatakan bahwa PAR adalah suatu istilah yang memuat seperangkat asumsi yang mendasari paradigma baru pengetahuan dan bertentangan dengan paradigma pengetahuan tradisional atau kuno. Asumsi-asumsi baru tersebut menggaris bawahi arti penting proses sosial dan kolektif dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan mengenai “apa kasus yang sedang terjadi” dan “apa kasus yang sedang terjadi” dan “apa implikasi perubahannya” yang dipandang berguna oleh orang-orang yang berada pada situasi problematis, dalam mengantarkan penelitian awal.

Jika ilmu pengetahuan konvensional hendak memberikan kepada sekelompok orang suatu kekuatan untuk menentukan kebenaran dirinya dan atas nama orang lain, maka paradigma baru ini muncul dari dunia yang memiliki berbagai macam versi tentang kebenaran dan realitas sebagai cara untuk membantu manusia dalam

¹⁰²Agus Afandi. dkk, “modul *participatory action research (par): untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*”, lppm uin sunan ampel surabaya, surabaya:2016, hal.91

mencapai suatu kebenaran melalui realitas pengalaman mereka sendiri dan untuk mencakup kebenaran pada orang lain. Arti penting dari pemahaman bersama ini ditemukan dalam topik-topik yang telah dipilih oleh agen PAR yang sebagian besar berkaitan dengan situasi-situasi sulit dari perubahan sosial, hilangnya cara-cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ancaman terjadinya kekerasan dan alienasi.

PAR tidak mengkonseptualisasikan alur menuju dunia yang seharusnya ada sebagai perkembangan terhadap teori sebab-akibat yang bersifat prediktif (jika begini maka begitu). Sebaliknya, slogan PAR adalah “masa depan diciptakan, bukan diprediksi” atau (jika kita melakukan begini, maka hasilnya barangkali begitu). PAR lebih merupakan teori kemungkinan (*Possibility*) dari teori prediksi¹⁰³. Secara bahasa PAR terdiri dari tiga kata yaitu *participatory* atau dalam bahasa Indonesia adalah partisipasi yang artinya peran serta. Kemudian *action* yang artinya gerakan atau tindakan dan *research* atau riset yang mempunyai arti penelitian atau penyelidikan. Singkatnya PAR merupakan sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisa pengetahuannya mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan.¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid, hal 92.,

¹⁰⁴ Nano Prawoto, “*Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)*”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2012, hal. 139.,

B. Subjek Dampingan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang sudah ada. Beberapa kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok tani, kelompok tani wanita, kelompok yasin dan tahlil tiap dusun, kelompok organisasi masyarakat berbasis sosial budaya seperti pencak silat dan banjari, hingga kelompok arisan aparatur desa yang anggotanya terdiri atas seluruh ketua RT, ketua RW, BPD dan jajaran aparatur desa yang diselenggarakan pada setiap *senin wage*¹⁰⁵. Namun peneliti dengan aparatur desa dan masyarakat sepakat memilih forum arisan RT sebagai kelompok dampingan.

Karena selain jangkauan masyarakat yang lebih luas dan lebih lengkap dan dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam satu desa, sifat dapat terwakilkan atas program-program yang dijalankan dari penelitian ini membuat alasan memilih kelompok arisan RT menjadi relevan dan di nilai lebih efektif. Forum ini juga di nilai lebih focus dalam penyampaian maksud dan tujuan pendampingan di desa agar lebih siap siaga dalam menghadapi bencana di tingkat paling kecil di desa.

Forum arisan RT atau kelompok arisan RT ini beranggotakan 74 orang. Yang terdiri atas 30 ketua RT, 11 ketua RW, 4 kepala dusun, 15 BPD dan tokoh masyarakat serta 14 orang jajaran aparatur desa. Yang kemudian 74 orang tersebut menjadi subjek dampingan dan mitra dalam penelitian dengan mengedepankan partisipasi aktif untuk bersama-sama mencari, mengolah dan menentukan strategi dalam

¹⁰⁵ Salah satu hari dalam satu bulan di penanggalan Jawa.

pemecahan masalah yang ditemukan. Hingga, kemudian memunculkan *local leader* baru dan gerakan ini dapat di implementasikan di setiap komponen masyarakat desa.

Tabel 3.1
Daftar anggota arisan RT dalam struktur desa tangguh bencana Desa Depok

No.	Jabatan	Tugas Pokok dan Fungsi	
1.	Suroto	Pembina	Sebagai penyelenggara Desa Siaga Bencana
2.	Babinkamtibmas Babinsa BPD	Penasehat	Sebagai pemberi arahan dan masukan untuk menciptakan Desa Siaga Bencana
3.	Rani	Koordinator	Ketua pelaksana Desa Siaga Bencana
4.	Sukar	Sekretaris	Bertanggung jawab atas surat-menyurat Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok
5.	Bibit	Bendahara	Bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan keuangan Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok
6.	Suyono	Regu Peringatan Dini	Melakukan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) dan Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan atau kegiatan penyadaran masyarakat lainnya tentang bahaya bencana
7.	Slamet	Regu Pemetaan	Melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal, termasuk jalur evaluasi
8.	Nurbani	Regu Pelatihan	Menyelenggarakan latihan-latihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait. Menyelenggarakan simulasi/gladi bencana sesuai jenis dan kerawanan bencananya secara periodik sesuai kebutuhan.

9.	Sukiman	Regu Pertolongan Pertama Dan SAR	Melakukan tindakan upaya awal penanggulangan bencana, memberikan pertolongan pertama dan menjadi tim pencari dan penyelamat apabila terdapat korban jiwa hilang dan belum di temukan secara cepat
10.	Eko	Regu Penilaian Cepat	Melakukan penilaian korban jiwa, harta dan kerugian yang di taksir saat terjadi bencana
11.	Purwadi	Regu Pengungsian	Mengevakuasi masyarakat dan Menyiapkan tenda pengungsian, sanitasi serta kebutuhan air bersih untuk pengungsi
12.	Ari.E	Regu Dapur Umum	Menyiapkan kebutuhan konsumsi masyarakat di pengungsian
13.	Wijianto	Regu Logistik dan Perlengkapan	Membuat Lumbung Bencana sebagai kesiapan logistik dan sarana prasarana penunjangl
14.	Endah	Regu Administrasi dan Dokumentasi	Melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan Desa Siaga Bencana secara berjenjang kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota/provinsi dan Kementerian Sosial RI, baik kejadian bencana ataupun kegiatan rutin dan lainnya.
15.	Yasir	Regu Hubungan Masyarakat	Bekerjasama dan membentuk jejaring kerja dengan pihak-pihak yang dianggap terkait.
16.	Bibit (Pande)	Regu Pendataan Pemulihan	Melakukan pendataan kebutuhan masyarakat pasca bencana
17.	Suyono	Regu Fasilitator Masyarakat	Membantu memfasilitasi kebutuhan masyarakat pasca bencana
18.	Katini	Regu Pendampingan	Membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial

Sumber : hasil FGD dengan masyarakat

C. Prosedur Penelitian dan Pendampingan

1. Pemetaan Awal (*Preliminary Mapping*)

Pemetaan awal sebaagai alat untuk memahami komunitas, sehingga mudah memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi¹⁰⁶. Dalam penelitian ini peneliti bersama *stakeholder* terkait, seperti masyarakat dan apartur desa memetakan wilayah desa meliputi pemetaan wilayah dengan risiko bencana alam tanah longsor ringan, sedang hingga tinggi. Pemetaan juga dilakukan untuk mengetahui daerah rawan bencana, kelompok rentan dan peta kapasitas masyarakat desa.

2. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Peneliti melakukan inkulturasi dengan masyarakat sebagai upaya membangun *trust*. Mengikuti kegiatan sehari-hari di masyarakat seperti menjemur singkong untuk di buat pati, mengikuti kegiatan yasin dan tahlil bergiliran di rumah warga, hingga menjadi panitia di salah satu acara pernikahan anak warga di RT 03.

Sehingga setelah terbangun *trust* antara peneliti dan masyarakat, masyarakat secara partisipatif dapat menjadi narasumber dan pihak yang secara langsung aktif terlibat dalam penelitian. Hubungan yang terjalin antara peneliti dan masyarakat sejajar dan saling belajar. Untuk membuat suatu perubahan kea rah yang lebih baik.

Mulai dari menemukan masalah tentang kebencanaan di desa yang sering mereka alami, mengolah menjadi data berupa *trend* terjadinya bencana di desa dan pemetaan wilayah paling rawan, rawan yang sedang dan tidak rawan atau aman.

¹⁰⁶Agus Afandi. dkk, "modul *participatory action research (par): untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*", lppm uin sunan ampel surabya, surabaya:2016, hal.104.,

Sehingga data yang di himpun oleh peneliti dan masyarakat dapat di gunakan sebagai media informasi tentang kebencanaan. Yang harapannya setelah mengetahui informasi tentang kebencanaan di desa, masyarakat menjadi sadar dengan potensi yang mengancam mereka.

3. Pemetaan Partisipatif

Bersama masyarakat dan aparatur Desa Depok dengan metode FGD peneliti melakukan pemetaan wilayah, melihat persoalan bencana tanah longsor terutama pra bencana dan kesiapsiagaan serta upaya pengurangan risiko bencana apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat .

4. Penentuan Agenda Riset Untuk Perubahan Sosial

Bersama masyarakat, peneliti mengagendakan program riset melalui teknik participatory rural approach untuk memahami masalah kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam longsor guna menentukan waktu yang tepat untuk upaya pengurangan risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kelompok tangguh bencana desa.

5. Menentukan Masalah Kemanusiaan

Masyarakat Desa Depok diwakili oleh kelompok arisan RT merumuskan masalah utama kebencanaan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tanah longsor dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana yang sering terjadi di desa mereka. Pendampingan ini fokus kemanusiaannya adalah penyadaran untuk pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana tanah longsor dengan membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam tanah longsor.

6. Menyusun Strategi Gerakan

Masyarakat Desa Depok diwakili oleh kelompok arisan RT bencana bersama peneliti menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kebencanaan yang selama ini responsive menjadi preventif dan tanggap darurat. Focus gerakannya adalah kesadaran pentingnya pengurangan risiko bencana tanah longsor dengan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta menurunkan risiko bencana tanah longsor dengan meningkatkan kapasitas masyarakat serta advokasi untuk pemerintah desa agar menerapkan desa tangguh bencana.

7. Pengorganisasian Masyarakat

Kelompok arisan RT Desa Depok didampingi peneliti membangun pranata-pranata sosial. Dalam hal ini adalah membentuk komunitas tangguh bencana yang kemudian menjadi *local leader* dalam upaya PRB serta memaksimalkan sarana dan prasarana early warning system local seperti kentongan, penghijauan di daerah rawan, advokasi kebijakan dan peraturan desa sebagai bebrapa upaya kesiapsiagaan dan mitigasi yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan perubahan paradigma melalui kampanye siaga bencana tanah longsor di Desa Depok.

8. Melancarkan Aksi Perubahan

Untuk keberhasilan dari telah berkurangnya risiko bencana tanah longsor perlu memerlukan penilaian secara berkala dan berkelanjutan, oleh karena itu kelompok arisan RT di masyarakat ini sepenuhnya menjalankan system yang telah dibangun dan dibentuk bersama karena perubahan dari pengurangan risiko bencana ini tidak terlihat secara jelas, namun bertahap, tidak tiba-tiba namun perubahannya dapat

dirasakan beberapa waktu jika terjadi bencana lagi. Salah satu indicator perubahannya adalah ketika terjadi bencan lagi, masyarakat telah siap dan berkurangnya erugian yang diakibatkan oleh bencana alam, khususnya tanah longsor.

9. Membangun Pusat-Pusat Belajar Masyarakat

Komunitas atau kelompok arisan RT merupakan alternative tempat masyarakat belajar bagaimana upaya pengurangan risiko bencana sebagai realisasi dari pusat-pusat belajar masyarakat terutama untuk masalah kebencanaan. Kelompok ini dibentuk atas dasar kebutuhan dan keinginan masyarakat karena ingin menurunkan risiko bencana alam tanah longsor yang tejadi di wilayah mereka.

10. Refleksi

Peneliti bersama komunitas didampingi oleh dosen pembimbing merumuskan teorisasi perubahan sosial. Berdasarkan hasil riset, proses pembelajaran masyarakat dan program-program aksi yang sudah terlaksana, peneliti dan komunitas tangguh bencana bersama *stakeholder* terkait merefleksikan semua proses dan hasil serta perubahan apa saja yang telah diperoleh dari awal hingga akhir.

11. Meluaskan Skala Dukungan

Berawal dari piloting project kelompok arisan RT masyarakat Desa Depok, jika kemudian ditemukan perubahan dan hasil yang signifikan terhadap upaya pengurangan risiko bencana, maka akan diluskan ke Desa-Desa lain bahkan kecamatan hingga kabupaten untuk menyongsong Indonesia tangguh bencana.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data menggunakan teknik PRA (*participatory rural appraisal*) atau pemahaman pedesaan berdasarkan peran serta secara umum melakukan pendekatan kolektif, identifikasi, dan klasifikasi masalah yang ada dalam suatu wilayah pedesaan. PRA sendiri adalah sebuah teknik untuk menyusun dan mengembangkan program operasional dalam pembangunan tingkat desa. Metode atau teknik ini ditempuh dengan memobilisasi sumber daya manusia dan alam setempat, menstabilkan dan meningkatkan kekuatan masyarakat setempat serta mampu pula melestarikan sumber daya setempat.

PRA mempunyai tujuan utama untuk menjaring rencana atau program pembangunan tingkat pedesaan yang memenuhi persyaratan. Syaratnya adalah diterima oleh masyarakat setempat, secara ekonomi menguntungkan dan berdampak positif bagi lingkungan. Secara prinsip metode atau teknik ini dapat membantu dalam menggerakkan sumber daya alam dan manusia untuk memahami masalah, mempertimbangkan program yang telah sukses, menganalisis kapasitas kelembagaan lokal, menilai kelembagaan modern yang telah diintrodusir dan membuat rencana program spesifik yang operasional dan sistematis.¹⁰⁷

Sehingga program-program yang dilaksanakan dilapangan nantinya akan tepat sasaran. Dengan cara menentukan apa, siapa dan bagaimana proses pendampingan tersebut. Sebagai mana dalam proposal ini adalah pendampingan pada kelompok masyarakat tangguh bencana di Desa Depok untuk upaya pengurangan risiko bencana

¹⁰⁷ Moehar Daniel, dkk, "PRA (*Participatory Rural Appraisal*)", PT. Bumi Aksara, Jakarta:2008, hal. 37

alam tanah longsor dengan melibatkan *stakeholder* terkait serta program-program seperti penyadaran dan perubahan paradigma masyarakat tentang bencana itu sendiri, serta upaya advokasi untuk kebijakan dan peraturan pemerintah desa untuk mengintegrasikan menjadi desa tangguh sebagai rekomendasi.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka pendamping dengan masyarakat akan melakukan sebuah analisis bersama. Analisis ini digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi mengenai bencana alam tanah longsor dan upaya apa yang hendak dilakukan, adapun yang dilakukan nantinya adalah:

1. Pemetaan (*Mapping*)

Tenik menggali informasi yang meliputi sarana fisik dan kondisi sosial dengan menggambar kondisi wilayah secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah peta bersama masyarakat. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumber daya umum desa atau peta dengan topik tertentu (*topical*). Hasil dari teknik ini banyak digunakan untuk mengarah kepada teknik-teknik lain, sehingga teknik ini biasanya digunakan pada awal-awal proses PRA, yang selanjutnya diperdalam dengan teknik lain.¹⁰⁸

2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara ini meliputi penggalan informasi berupa Tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu.¹⁰⁹ Wawancara semi terstruktur ini akan mendeskripsikan hasil dari beberapa kumpulan wawancara tentang kaitannya dengan

¹⁰⁸Agus Afandi. dkk, "modul *participatory action research (par): untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*", lppm uin sunan ampel surabaya, surabaya:2016, hal.145-146.,

¹⁰⁹ Ibid, hal. 181.

kebencanaan yang terjadi di wilayah Desa Depok dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait.

3. FGD (*focus group discussion*)

Proses diskusi kelompok yang terarah. Yaitu wawancara dari kelompok kecil yang dipimpin oleh narasumber yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi. Dalam hal ini peserta FGD melakukan perumusan masalah hingga penentuan strategi pemecahan masalah tentang pengurangan risiko bencana.

E. Teknik Validasi Data

Dalam prinsip metodologi PRA untuk mengkroscek data yang diperoleh dapat melalui triangulasi. Triangulasi adalah suatu system kroscek dalam pelaksanaan teknik PRA agar memperoleh informasi yang akurat.¹¹⁰

1. Triangulasi Komposisi Komunitas

Triangulasi akan dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat desa terutama kelompok tangguh bencana. Triangulasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid dan tidak sepihak. Semua pihak ikut berpartisipasi untuk mendapatkan kesimpulan bersama.

2. Triangulasi Alat dan Teknik

Dalam pelaksanaan di lapangan selain melakukan observasi langsung terhadap lokasi atau wilayah, juga perlu dilakukan interview dan diskusi dengan masyarakat desa atau kelompok tangguh bencana bahkan *stakeholder* terkait melalui FGD (*focus*

¹¹⁰ Ibid, hal. 153.,

group discussion). Triangulasi ini dilaksanakan pada proses penyadaran dan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana dimulai, dengan pencatatan dokumen maupun diagram.

3. Triangulasi Keragaman Sumber Informasi

Triangulasi ini didapatkan ketika proses pengurangan risiko bencana, antara peneliti, *stakeholder* terkait dan komunitas tangguh bencana desa saling memberikan informasi, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi langsung di lapangan sebagai keberagaman data.

F. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan maka peneliti dengan kelompok tangguh bencana desa akan melakukan sebuah analisis bersama. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hingga mengurai masalah tentang rendahnya kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana alam tanah longsor di Desa Depok. Adapun alat analisis yang digunakan nantinya adalah :

1. Analisa Kalender Musim

Kalender musim adalah suatu tekni PRA yang dipergunakan untuk mengetahui kegiatan utama, masalah dan kesempatan dalam siklus tahunan yang dituangkan dalam bentuk diagram. Hasilnya yang digambar dalam suatu “kalender” dengan bentuk matriks, merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan rencana

program. Kaitanya dengan kebencanaan terutama bencana alam tanah longsor dapat dilihat intensitas hujan yang terjadi hingga perubahan musim di Desa Depok.¹¹¹

2. Analisa Diagram Venn

Dengan teknik analisa diagram venn akan dapat melihat keterkaitna suatu lembaga dengan lembaga yang lain. Misalnya elit desa dengan masyarakat desa guna mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam manajemen bencana beserta peran dan seberapa besar pengaruhnya satu dengan yang lain.¹¹²

3. Analisa Diagram Alur

Diagram alur akan menggambarkan arus dan hubungan diantara semua pihak-pihak yang terlibat hingga membentuk suatu system. Seperti di lapangan maka diagram alur akan melihat sebuah kerangka kerja system dalam upaya pengurangan risiko bencan alam tanah longsor.¹¹³

4. Analisa *Timeline*

Merupakan teknik penelusran alur sejarah suatu masyarakat dengan menggali kejadian penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu. Hal ini dapat menelusuri sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi, hingga menelusuri kejadian paling berat samapi paling ringan skalanya. Sehingga rekam kejadian kebencanaan dapat diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun.¹¹⁴

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 165.,

¹¹² *Ibid*, hlm. 172.,

¹¹³ *Ibid*, 175.,

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 185.,

5. *Analisa Trend and Change*

Bagan perubahan dan kecenderungan merupakan teknik PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hasilnya di gambar dalam satu matriks. Dari besarnya perubahan hal-hal yang diamati dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa depan. Hasilnya adalah bagan atau matriks perubahan dan kecenderungan yang umum desa atau yang berkaitan dengan topik tertentu.¹¹⁵

6. Analisis Pohon Masalah dan Pohon Harapan

Teknik yang digunakan untuk memperoleh masalah dan harapan yang telah distrukturkan. Mulai dari akar permasalahan yang akan dipecahkan bersama masyarakat dan sekaligus program apa yang akan dilakukan. Kebalikannya, pohon harapan adalah impian kedepan dari hasil kedepannya. Dalam konteks upaya pengurangan risiko bencana dapat diketahui akar masalahnya adalah kerentanan masyarakat Desa Depok dalam menghadapi bahaya bencana alam tanah longsor.

7. Analisa Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas

Analisa kerentanan meliputi analisis sosial dalam pengertian klasik dimana kelompok-kelompok sosial tertentu serta hubungannya dengan faktor-faktor dalam konteks kerentanan bisa diidentifikasi. Konteks merentankan menunjuk pada seasonality, gejala-gejala, dan kejadian-kejadian yang mengejutkan dan mempengaruhi aspek penghidupan (livelihoods) masyarakat. Ciri khas dari konteks

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 162.,

ini adalah ia tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat setempat, paling tidak dalam jangka pendek dan menengah.

Oleh karena itu, penting mengidentifikasi cara-cara tidak langsung dengan mana efek-efek negatif dari konteks merentankan bisa diminimalkan, termasuk membangun ketahanan yang lebih baik dan meningkatkan keamanan penghidupan secara keseluruhan.¹¹⁶

8. Analisa GIS (*geographic information system*)

Penggunaan system untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial terkait dengan muka bumi.¹¹⁷ Sehingga setelah di lakukan pemetaan secara manual data terkait spasial akan diolah dalam format GIS.

G. Jadwal Penelitian dan Pendampingan

Pelaksanaan penelitian dan pendampingan terdiri atas dua periode, periode pertama peneliti sebelum melakukan penelitian dan pendampingan di lokasi penelitian. Di mulai pada bulan Oktober tahun 2016 hingga Febuari tahun 2017, terlebih dahulu melakukan *assessment* terhadap materi-materi dan teori-teori di kelas dan di buku selama satu bulan di Surabaya. Kemudian untuk periode selanjutnya peneliti pada saat di lokasi penelitian dan pendampingan dengan penelitian PAR dan teknik PRA kurang lebih membutuhkan waktu 4 bulan. Jadi apabila dapat di tampilkan dalam sebuah tabel akan menjadi seperti di bawah ini;

¹¹⁶ Jonatan Lassa dkk, "*Kiat Tepat Mengurangi Resiko Bencana Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)*", PT. Grasindo, Jakarta:2009, hlm. 42.,

¹¹⁷ Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, hlm. 3.,

Tabel 3.2

Jadwal pelaksanaan penelitian dan pendampingan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan																
		Oktober 2016				November 2016				Desember 2016				Januari 2017		Februari 2017		
1.	Assessment teori-teori PRB	x	x	x	x													
2.	Inkulturasi				x	x												
3.	Menentukan agenda riset					x												
4.	Observasi dan merumuskan masalah kemanusiaan						x	x										
5.	Menyusun strategi gerakan								x	x	x	x	x					
6.	Pengorganisasian masyarakat											x	x					
7.	Melancarkan aksi perubahan													x	x			
8.	Membentuk kelompok tangguh													x	x			
9.	Refleksi													x	x			
10.	Meluaskan skala gerakan dukungan															x	x	x

Sumber : analisa peneliti

H. Analisa *Stakeholder*

Dalam pelaksanaan penelitian dan pendampingan untuk upaya PRB tentu peneliti tidak sendirian. Beberapa pihak bahkan banyak pihak turun ambil peran. Karena dalam proses pemberdayaan kebersamaan adalah suatu asset penting yang harus terbangun, dengan partisipasi masyarakat khususnya, masalah yang telah ditemukan menjadi lebih mudah dalam pemecahannya. Beberapa pihak atau *stakeholder* tersebut ialah;

Tabel 3.3
Analisa *Stakeholder*

No.	Institusi	Karakteristik	Resource	Bentuk keterlibatan	Tindakan yang harus di lakukan
1.	Kelompok rentan	Masyarakat yang rentan terkena dampak bencana tanah longsor	Memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pengurangan risiko bencana	Sebagai subjek yang menjalankan upaya pengurangan risiko bencana	Terlibat aktif dalam kampanye dan peningkatan pemahaman dengan informasi tentang pengurangan risiko bencana Merubah paradigma tentang bencana yang di tangani dengan responsive menjadi preventive dan melakukan PRB
2.	Pemerintah Desa	Penyelenggara pemerintah desa dan pengambil kebijakan desa, termasuk kebijakan penanganan kebencanaan	Memiliki otoritas tertinggi di tingkat desa		
3.	Kelompok	Wadah ketua	Keanggotaan	Sebagai	Memberikan arahan

	ok Arisan RT	RT, ketua RW, Kepala Dusun dan jajaran Pemerintah Desa serta BPD	yang terstruktur dan legal di bawah pemerintah desa, sumber dana dapat di himpun oleh anggota	kelompok utama dalam riset partisipatif untuk perubahan dalam PRB di desa Termasuk inisiasi dan perumusan startegi pemecahan masalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa sebagai pemegang otoritas penuh untuk pembangunan dan pengemangan desa	dan informasi serta membangun kesadaran dengan masyarakat tentang kebencanaan dan upaya PRB di desa
4.	Puskesmas	Sebagai lembaga kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat desa	Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang rentan terganggu kesehatannya	Pemberi informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebencanaan kepada masyarakat	Memberikan arahan kepada masyarakat melalui pendekatan intra personal maupun ekstra personal tentang kesehatan dan kebencanaan
5.	BPBD	Lembaga pemerintah	Penyedia data,	Sebagai narasumber	Pemberi informasi tentang

		yang focus menangani isu-isu kebencanaan dan lembaga yang ahli kebencanaan	kebencanaan, pengetahuan dan informasi PRB	ahli tentang kebencanaan dan pendamping kelompok tangguh yang akan di bentuk di desa	kebencanaan dan mendampingi desa dalam PRB
6.	Babinsa	Anggota TNI AD yang bertugas dan berdomisili di desa penelitian	Memiliki pengetahuan dan skill pengurangan risiko bencana kerana terlatih di instansi TNI	Sebagai sumber informasi dan data kebencanaan di Desa Depok serta <i>stakeholder</i> yang dapat memobilisasi aset dan komunitas	Pengorganisir komunitas dalam PRB serta pendamping/ pembina komunitas dalam PRB

Sumber : Analisa Peneliti

Dari tabel di atas, dapat dilihat beberapa *stakeholder* yang terlibat yaitu, kelompok rentan yang ada di Desa Depok, jajaran pemerintah Desa Depok, kelompok arisan RT, instansi puskesmas di Desa Depok, BPBD Kab. Trenggalek, serta anggota Babinsa Desa Depok. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam upaya PRB di Desa Depok. Diharapkan seluruh *stakeholder* dapat bekerjasama dan terjalin komunikasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik di Desa Depok.

Diagram 4.2

Presentase Jenis Kelamin Penduduk Desa Depok



Sumber : Monografi Desa Depok

Kemudian terbagi dalam masing-masing dusun dengan jumlah penduduk yang berbeda, seperti Dusun Soko terdiri dari 388 KK, 1.386 jiwa dengan laki-laki 707 jiwa dan 679 jiwa perempuan. Dusun Kebunagung terdiri dari 307 KK, 1.282 jiwa dengan 648 jiwa laki-laki dan 634 jiwa perempuan. Dusun Banaran terdiri dari 367 KK, 1.365 jiwa dengan 680 jiwa laki-laki dan 685 jiwa perempuan. Yang terakhir Dusun Joho yang terdiri dari 144 KK, 595 Jiwa dengan 306 jiwa laki-laki dan 289 jiwa perempuan.

Tabel 4.4

Data kependudukan Desa Depok

No.	Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1.	Soko	388	707	679
2.	Kebunagung	307	648	634
3.	Banaran	367	680	685
4.	Joho	144	306	289
Total		1.206	2.341	2.287
			4.628	

Sumber : profil Desa Depok tahun 2014

D. Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Depok baik laki-laki maupun perempuan dapat di katakan cukup. Paradigma masyarakat yang masih menganggap pendidikan tinggi tidak penting juga masih banyak. Didukung oleh pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat rendah dan tidak merata. Membuat semakin tinggi isu rendahnya pendidikan masyarakat Desa Depok.

Hal tersebut tampak pada tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan di Desa Depok. Dari data statistik desa mencatat dari usia 3-6 tahun yang belum masuk TK laki-laki ada 30 orang dan perempuan 28 orang, Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group laki-laki ada 60 orang dan perempuan 69 orang. Sedangkan usia 7-18 tahun yang sedang sekolah laki-laki 220 orang dan perempuan 206 orang.

Untuk program pemerintah wajib belajar 12 tahun dirasa belum maksimal jika dilihat dari usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah laki-laki 223 orang dan perempuan 272 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD laki-laki 63 orang dan perempuan 34 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP laki-laki 223 orang dan perempuan 272 orang. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA laki-laki 63 orang dan perempuan 34 orang.

Sedangkan untuk penduduk yang telah tamat SD/ sederajat laki-laki 1.215 orang dan perempuan 893 orang. Tamat SMP/ sederajat laki-laki 862 orang dan perempuan 498 orang. Tamat SMA/ sederajat laki-laki 1109 dan perempuan 751 orang. Tamat D1/ sederajat laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan 4 orang. Tamat D2/ sederajat laki-laki 2 orang dan yang perempuan tidak ada. Tamat

Bertahun-tahun fenomena tersebut terjadi hingga diputuskan oleh pemangku Desa agar dilaksanakan *Rembug Desa* yang mana dalam acara tersebut disepakati bahwa akan dilaksanakan penggabungan Desa Tawang dengan Desa Blendis, menjadi Desa Depok. Alasan diambil dalam *Rembug Desa* secara politis adalah untuk menghindari kecemburuan antara penduduk Desa Tawang dan Desa Blendis apabila tetap menggunakan nama salah satu diantara nama desa yang di *marger* tersebut.

Sedangkan asal mula nama Depok sendiri menggunakan nama dari *Pesanggrahan* yang terletak di Desa Tawang dan Desa Blendis serta keberadaannya dikeramatkan oleh penduduk Desa. Penduduk local menamai *Pesanggrahan* tersebut dengan Padepokan. Kemudian nama *Pesanggrahan* keramat ini dijadikan nama baru dari penggabungan Desa Tawang dan Desa Blendis. Untuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala Desa Depok maka waktu itu dilakukan pemilihan Lurah secara langsung untuk yang pertama kali memimpin Desa Depok. Dengan dua kandidat calon kepala Desa yaitu, Sanodrono (Lurah Tawang) dan Moenodjo Dikil (Lurah Blendis) menggunakan tata cara pemilihan yang sangat sederhana di suatu tempat yang bernama *Pandean*. Kedua calon Lurah berdiri kemudian para pendukung (pemilih) berdiri berjajar dibelakang calon yang dipilihnya.

Setelah semua pemilih datang dan telah menyalurkan hak pilihnya dilanjutkan dengan perhitungan suara. Hingga hasil yang didapatkan menentukan Sanodrono menjadi Lurah Desa Depok untuk yang pertama kalinya. Begitulah

menjangkau dalam mengakses kesehatan bahkan ketika diperlukan tenaga kesehatan siap melayani ke rumah-rumah warga.

Dari data monografi Desa Depok tahun 2015, sarana dan prasarana di desa yang dapat dikatakan cukup, meskipun masih ada masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena keterbatasan jarak dan medan yang berat. Hal ini terjadi pada masyarakat Dusun Joho dan Dukuh Nggelang. Sehingga tenaga medis yang dimiliki sewaktu-waktu harus siap jika terjadi keadaan darurat di wilayah tersebut. Seperti kejadian pra persalinan yang hampir tidak tertolong di Dukuh Nggelang karena wilayah dengan medan ekstrem, sehingga sangat riskan seorang ibu hamil dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga tenaga medis yang datang ke rumahnya untuk melaksanakan persalinan.

Kesehatan lingkungan juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Seperti sanitasi, pengelolaan limbah padat maupun cair, gaya hidup dan promosi kesehatan. Faktor-faktor di atas belum sepenuhnya bahkan tidak diterapkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki sanitasi/jamban sehat di rumahnya, ironisnya masyarakat lebih gemar BAB di sungai sehingga penyakit yang sering diderita tidak jauh akibat dari perilaku kesehatan yang buruk. Desa juga tidak memiliki sistem pengelolaan limbah padat maupun cair. Sehingga limbah domestik rumah tangga juga lebih sering dibuang di sungai atau sekitar rumah untuk kemudian dibakar.

Tabel 4.12

Penyakit yang sering di deritas masyarakat Desa Depok

No.	Penyakit yang Sering diderita	Jumlah (orang)
1.	Kecacingan	130
2.	Ispa	265
3.	Gatal-gatal	194
4.	Diare	125
5.	Tipoid	30

Sumber : Polindes Depok 2016

Faktor pengetahuan dan pendidikan masyarakat memang berperan besar dalam mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, namun jika hanya berperilaku sehat dengan memiliki jamban sehat dan membuang sampah pada tempatnya adalah peran kesadaran masyarakat. Sebenarnya masyarakat telah memiliki pengetahuan akan bahaya BAB sembarangan dan pencemaran sungai akibat buang sampah sembarangan dapat memberi dampak tidak baik bagi kehidupan. Namun, karena telah menjadi kebiasaan sehingga pola-pola perilaku kebersihan dan kesehatan lingkungan Desa Depok sangat rendah.

Melihat beberapa bangunan maupun kader-kader yang disiapkan untuk membantu masalah kesehatan dan lingkungan di masyarakat memang memberi dampak yang cukup signifikan. Terdapat 7 unit Posyandu yang tersebar di setiap dusun, posyandu ini biasanya digunakan sebagai pos untuk ibu-ibu melakukan penimbangan anak-anak mereka untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan mengontrol tumbuh kembang anak balita mereka dan satu Posyandu lansia untuk dan *chek up* lansia. Sedangkan jumlah kader Posyandu yang aktif berjumlah 35 orang yang. Dengan jumlah pembina Posyandu 3 orang. Jumlah petugas lapangan keluarga berencana (KB) yang masih aktif terdapat 2 orang.

dalam sehari-hari yang tersebar hampir disetiap RT. Dari sekian jumlah umat islam mayoritas mereka adalah pengikut ormas islam nahdhatul ulama' (NU) sehingga tidak heran apabila rutinitas-rutinitas keagamaan yang bernafaskan NU sangat kental dan mempunyai pengaruh tersendiri terhadap keseharian masyarakat secara kompleks. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali seperti yasinan baik laki-laki maupun perempuan yang dibedakan waktu pelaksanaannya disetiap RT, seperti yasinan di RT. 03 jika pada malam rabu untuk kaum perempuan mayoritas adalah ibu-ibu, sedangkan untuk malam jumat untuk kaum laki-laki yang mayoritas adalah kepala keluarga. Dalam pelaksanaan kegiatan yasinan ini yaitu dilakukan secara berurut dari setiap rumah warga (KK), biasanya akan diumumkan setelah pengajian yasinan selesai dan para peserta sedangkan menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Sedangkan untuk memperlancar kegiatan didalam pembiayaan konsumsi atau sarana prasaran dibuat kas, biasanya para peserta yasinan menunjuk salah satu warga untuk menjadi bendahara kas.

Dan ketika adalah salah satu warganya yang meninggal, maka pada mulai malam harinya akan dilakukan tahlilan sebagai pengantar doa untuk jenazah agar mendapatkan keselamatan dialamnya, kegiatan tahlil ini dilakukan sampai 7 hari kedepan, dan setelah 40 hari, 100 hari, 1000 hari dari setelah meninggalnya. Namun ada juga beberapa ormas islam lain yang ada di Desa Depok ini, seperti Muhammadiyah, lembaga dakwah islam Indonesia (LDII). Meskipun perbedaan jumlah pengikut yang sangat berbeda diantara NU dengan

yang lainnya, namun kerukunan antar warga ini bisa menjadi penyatu dalam menghormati yang lainnya.

6. Budaya

Masuk dalam wilayah di jalur lintas selatan desa ini memiliki kebudayaan yang tidak terlepas dari pengaruh kuat budaya kerajaan mataram, baik pada masa hindu –budha maupun era kasultanan mataram islam yang berpusat pada kasunanan Surakarta dan kasultanan Yogyakarta di masa lampau. Dari segi kedekatan budayanya dengan Jawa tengah bahasa sehari-hari yang di gunakan lebih halus. Karakteristik lingkungan Jawa mataraman adalah wilayah pegunungan yang di kelilingi oleh hutan milik Negara (perhutani). Hal ini menjadikan kultur masyarakat dengan pola pertanian di lahan yang subur dengan cuaca dan iklim yang sejuk.

Adat istiadat dan kesenian khas masyarakat Desa Depok juga mengalami perkembangan. Kultur dan perilaku masyarakat yang bersifat dinamis adalah suatu keniscayaan. Meskipun kelestarian budaya seperti wayang dan kearifan local lainnya seperti pola kehidupan bermasyarakat yang gotong royong dan menjunjung tinggi nilai dan norma hasil peleburan budaya Jawa dan Islam.

Letak geografis Desa Depok yang berbatasan langsung dengan kabupaten tulungagung di sebelah timur membuat asimilasi budaya yang tidak jauh berbeda. Sama-sama berada pada jalur lintas selatan pulau jawa membuat sebuah profil komunitas yang berasaskan budaya islam mataraman. Memiliki karakteristik wilayah yang di dominasi oleh wilayah pegunungan dengan luas wilayah didominasi oleh hutan Negara (perhutani) membuat pola kehidupan

masyarakat desa di pegunungan yang pekerja keras yang memiliki perangai ramah, gotong royong, guyub, tentram dan damai menjadi identitas penduduk Desa Depok.

Pada tahun 1755, dengan adanya Perjanjian Gianti, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Trenggalek seperti didalam bentuknya yang sekarang ini, kecuali Panggul dan Munjungan, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Kalau dibandingkan dengan era sekarang ini, dari 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek, terdapat 12 Kecamatan yakni Trenggalek, Bendungan, Durenan, Pogalan, Karang, Suruh, Tugu, Pule, Gandusari, Kampak, Watulimo, dan Dongko yang menjadi wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo. Hanya Kecamatan Panggul dan Munjungan yang masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.

Jika melihat letak geografis dan faktor sejarah membuat komposisi masyarakat yang memiliki budaya tinggi serta kegiatan sosial ekonomi yang signifikan pengaruhnya hingga sekarang. Walaupun kultur masyarakat merupakan sesuatu yang dinamis, namun budaya Jawa Mataraman masih tetap melekat dengan beberapa kearifan lokal yang tetap terjaga hingga sekarang. Membahas kebudayaan komunitas tidak lengkap jika makanan atau kulinernya tidak dibahas juga.

Masyarakat Desa Depok yang memiliki karakteristik masyarakat pegunungan selalu memanfaatkan hasil alam sebagai makanan pokok dan

makanan sehari-hari. Selain nasi, makanan pokok masyarakat Desa Depok adalah *thiwul* makanan pengganti nasi dari olahan singkong yang banyak ditemukan, bahkan menjadi komoditas utama desa ini. Sedangkan untuk lauknya selalu bersantan dan cenderung memiliki cita rasa pedas. Seperti sayur daun singkong, daun pepaya, bambu muda (*rebung*), jantung pisang dan sayur mayur lainnya.

7. Partisipasi Politik

Partisipasi masyarakat dalam politik sangatlah rendah sebagian masyarakat masih ada yang belum menggunakan hak pilihnya saat pemilihan. Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih ada 3255 orang. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu ada 2725 orang. Tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan hak suaranya yang menggunakan hak pilihnya. Jika pemilih yang mempunyai hak pilih sejumlah 3.255, sedangkan hanya 2.725 yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti sejumlah 530 jiwa tidak memilih.

Partisipasi peran perempuan dalam sector politik dan pemerintahan sangatlah kurang. Terbukti tidak adanya peran perempuan yang aktif di partai politik. Sedangkan peran laki-laki selalu mendominasi dengan peran yang beragam mulai dari pengurus partai politik hingga menjadi penduduk yang dipilih di kancah legislative.

Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai desa/kelurahan ada 4 partai yaitu PDIP, Demokrat, Golkar PKS. Semua partai politik itu tidak memiliki kantor sendiri di dalam desa. jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai

Dalam tabel morfometri (korelasi kelas lereng dan karakteristik kondisi lahan) jika warna yang nampak adalah warna kuning maka kemiringan lereng berkisar antara 4° - 8° (2% - 15%) di klasifikan dalam dua karakteristik. Kondisi lahan yang memiliki kemiringan lereng landai, bila terjadi longsor bergerak dengan kecepatan rendah, pengikisan dan erosi akan meninggalkan bekas yang sangat dalam (kuning muda). Lahan memiliki kemiringan lereng yang curam, rawan terhadap bahaya longsor, erosi permukaan dan erosi alur (kuning tua).

Sedangkan lahan dengan warna merah muda hingga ungu memiliki karakteristik kemiringan lereng yang curam sampai terjal, sering terjadi erosi dan gerakan tanah dengan kecepatan yang perlahan-lahan. Merupakan daerah rawan erosi dan longsor dengan kemiringan lahan mencapai 16° - 35° (30-70%) untuk merah muda. Lahan dengan kemiringan lereng 35° - 55° (70-140%) memiliki kemiringan lereng yang terjal. Sering ditemukan singkapan batuan, rawan terhadap erosi, untuk warna merah tua dan $>55^{\circ}$ ($>140\%$) adalah lahan yang memiliki kemiringan lereng yang terjal, singkapan batuan muncul dipermukaan, rawan terhadap longsor batuan (warna ungu).

Sedangkan wilayah Desa Depok memiliki persebaran kemiringan lereng yang berbeda-beda. Wilayah Desa Depok didominasi oleh wilayah dengan kemiringan lereng mencapai 16° - 35° (30-70%), artinya lahan memiliki kemiringan lereng yang curam sampai terjal, sering terjadi erosi dan gerakan tanah dengan kecepatan yang perlahan-lahan, merupakan daerah rawan erosi dan longsor. Atau dengan kata lain seluas 62.597 m^2 dari total luas wilayah Desa Depok 104.329 m^2 adalah wilayah rawan bencana. Selain itu terdapat derajat kemiringan lereng yang lain, seperti

kemiringan lereng 0° - 2° (0-2%) dan 2° - 4° (2-7%) masing-masing seluas 1% (1.043 m²), 8° - 16° (15-30%) dan 8° - 16° (15-30%) masing-masing 5% (5.216 m²), untuk kelas lereng 35° - 55° (70-140%) seluas 15% (15.649 m²) dan kelas $>55^{\circ}$ ($>140\%$) mencapai 13% (13.562 m²) Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 5.3

Hubungan Kelas Lereng Dan Karakteristik Kondisi Lahan di Desa Depok

Kelas Lereng	Proses Karakteristik Dan Kondisi Lahan	Simbol Warna Yang Disarankan	Luas Wilayah
0° - 2° (0-2%)	Datar atau hampir datar, tidak ada erosi yang besar, dapat diolah dengan mudah dalam kondisi kering	Hijau tua	1% (1.043 m ²)
2° - 4° (2-7%)	Lahan memiliki kemiringan lereng landai, bila terjadi longsor bergerak dengan kecepatan rendah, pengikisan dan erosi akan meninggalkan bekas yang sangat dalam	Hijau muda	1% (1.043 m ²)
4° - 8° (7-15%)	Lahan memiliki kemiringan lereng landai sampai curam, bila terjadi longsor bergerak dengan kecepatan rendah, sangat rawan terhadap erosi	Kuning muda	5% (5.216 m ²)
8° - 16° (15-30%)	lahan memiliki kemiringan lereng yang curam, rawan terhadap bahaya longsor, erosi permukaan dan erosi alur	Kuning tua	5% (5.216 m ²)
16° - 35° (30-70%)	lahan memiliki kemiringan lereng yang curam sampai terjal, sering terjadi erosi dan gerakan tanah dengan kecepatan yang perlahan-lahan, merupakan daerah rawan erosi dan longsor	Merah muda	60% (62.597 m ²)
35° - 55° (70-140%)	lahan memiliki kemiringan lereng yang terjal. Sering ditemukan singkapan batuan, rawan terhadap erosi.	Merah tua	15% (15.649 m ²)

penduduk yang bekerja sejumlah 3.307 orang, 310 orang adalah petani dan 2.933 orang adalah buruh tani.

Terdapat pula berbagai profesi penduduk dengan angka yang sangat sedikit. Seperti jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang hanya berjumlah 10 orang. Pengerajin industri rumah tangga 6 orang. Pedagang yang berjumlah 7 orang. Peternak dan pensiunan TNI/Polri masing-masing 4 orang. Penyedia jasa ojek 5 orang dan tenaga honorer 16 orang. Dengan presentase perbandingan pekerja laki-laki sebanyak 1.657 orang dan pekerja perempuan sebanyak 1.650 orang. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan nampak tidak begitu signifikan, karena perempuan juga bekerja di sawah atau di lahan produksi mereka.

Keberagaman profesi atau mata pencaharian masyarakat dalam suatu wilayah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan suatu komunitas tersebut. Jika dianalogikan dengan suatu komunitas didominasi oleh nelayan, maka jika terjadi suatu bencana tsunami besar dengan cakupan wilayah yang luas hingga ke seluruh wilayah komunitas yang akan melumpuhkan seluruh akses ekonomi nelayan pada daerah tersebut. Sehingga jika adanya kerugian harta benda maka itu adalah hilangnya aset komunitas dalam mengakses ekonomi menjadi semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin homogen jenis profesi atau mata pencaharian masyarakat dalam suatu daerah, maka kerentanan ekonomi masyarakat tersebut semakin tinggi. Berbanding terbalik dengan semakin heterogen profesi atau mata pencaharian masyarakat maka akan semakin rendah tingkat kerentanan ekonomi masyarakat tersebut.

maupun skala nasional bahkan tingkat lokal yang dimuat dalam instrumen kerangka kerja sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 – 2030, yang disusun menggunakan elemen-elemen yang dapat memastikan keberlanjutan pekerjaan yang telah dilakukan oleh negara-negara dan pemangku kepentingan di bawah HFA (*hyogo framework for action*) dan mengenalkan beberapa inovasi yang telah dibicarakan selama konsultasi dan negosiasi. Perubahan karena peralihan HFA menjadi kerangka kerja sendai yang terpenting adalah penekanan terhadap risiko bencana dan bukan lagi manajemen bencana seperti sebelumnya.

Penekanan juga diberikan pada definisi dari tujuh target global, pengurangan risiko bencana sebagai keluaran yang diharapkan risiko, fokus yang ditujukan pada pencegahan munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang sudah ada dan memperkuat ketangguhan serta beberapa prinsip panduan, termasuk tanggung jawab utama negara dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana, keterlibatan seluruh institusi masyarakat dan negara. Penanganan bencana harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Dukungan bagi pentingnya pengakuan serta pengembangan *traditional knowledge* di dalam kegiatan PRB, mengingat berbagai pengetahuan tradisional telah terbukti dapat mengurangi jumlah korban jiwa pada saat terjadinya bencana. Implementasi SFDRR 2015 – 2030 berdasarkan empat aksi prioritas adalah;

1. Memahami risiko bencana dengan tujuan pemahaman risiko yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal.

2. Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko dengan tujuan menyempurnakan prinsip partisipasi, keadilan dan kesetaraan, profesionalisme, kemandirian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tepat sasaran atau efektif
3. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dengan tujuan untuk investasi pembangunan struktural dan non-struktural yang berkelanjutan dan akuntabel di semua tingkatan dan tidak menimbulkan atau menambah risiko ekonomi dan sosial
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan pemerintah dan masyarakat memiliki kapasitas untuk merespon bencana dengan efektif secara mandiri dan mampu melenting balik setelah kejadian bencana serta membangun kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia telah membangun sumber daya yang berkelanjutan alam dan lingkungan, melalui manajemen pengurangan risiko bencana yang selain diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2015 -2019 dan kebijakan strategis nasional dalam penanggulangan bencana 2015 – 2019. Disebutkan bahwa sasaran pembangunan dalam manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan penurunan indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berada pada daerah rawan bahaya melalui;

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal
2. Mengurangi kerentanan terhadap bencana

Fenomena atau isu bencana alam bukan prioritas dalam kehidupan masyarakat. Mengutip dokumen pembentukannya, “Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah sebuah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/ tempat untuk program penanggulangan bencana” yang diluncurkan pada tahun 2011 oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. KSB dibentuk dengan maksud “untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat”¹⁷.

Karena menurut mereka kejadian tanah longsor secara frekuensi memang sering terjadi. Namun dari segi kuantitas atau besar kecilnya bencana tanah longsor yang terjadi di lingkungan desa cenderung kecil. Kejadian besar dan menimbulkan korban jiwa memang tidak pernah. Namun jika kerugian harta dan dampak psikologis beberapa kali telah terjadi. Di tahun 2008 saat intensitas hujan tinggi membuat longsor besar sehingga membuat 2 RT di relokasi ke tempat yang lebih aman. Ratusan KK mengungsi dan di relokasi ke tempat yang lebih aman (Sekarang RT 29 dan RT 30) Dusun Joho.

Sedangkan baru-baru ini fenomena bencana tanah longsor juga terjadi di Dusun Soko, Tepatnya di RT 01, 05 dan 06. Membuat 116 KK mengungsi di

¹⁷ Muhammad Belanawane S, “Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Indonesia: Politik Pembangunan Dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan,” SOSIO KONSEPSIA Vol. 5, No. 01, Jakarta:2015, hal. 310.,

lapangan Volly Dusun Soko. 3 rumah rusak berat dan menyebabkan masyarakat memiliki dampak psikologis dan trauma. Solusi relokasi sudah direkomendasikan kepada *stakeholder* terkait. Khususnya kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek. Adanya korban (dampak psikologis) dan kerugian harta serta materi dan kondisi lingkungan yang rentan terhadap bencana tanah longsor memberi ancaman bahaya yang lebih besar kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan, pola pikir, dan sikap siaga bencana. Hal ini menjadi faktor kerentanan sosial masyarakat Desa Depok menjadi lebih besar dibanding dengan masyarakat yang telah memiliki pengetahuan, pola pikir dan sikap siaga terhadap ancaman bahaya (bencana) yang mengancam lingkungan masyarakat.

Hal ini karena belum adanya kampanye mengenai informasi kebencanaan yang mengarah pada pembentukan atau perubahan pola pikir masyarakat mengenai bahaya dan ancaman bencana tanah longsor di lingkungan Desa Depok. faktor-faktor penyebab terjadinya longsor dan bagaimana cara penanggulangannya. Sehingga kejadian bencana tanah longsor yang pernah terjadi tidak terulang kembali, ataupun jika terjadi maka tidak akan menimbulkan dampak kerugian korban jiwa maupun kerugian materi hingga dampak psikologis. Karena tidak adanya pengetahuan dan pendidikan kebencanaan di desa, maka kesadaran masyarakat untuk siap siaga bencana juga tidak ada.

Dalam kondisi yang ideal seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat di lokasi tanah longsor sekurang-kurangnya melalui

BAB VI

DINAMIKA PROSES PENGORGANISASIAN KELOMPOK ARISAN RT DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

A. *Assessment* Awal

Assessment adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Terdapat berbagai macam jenis assesmen dan salah satunya adalah tes. Tes adalah assesmen yang pesertanya diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan secara tertulis/lisan ataupun mendemonstrasikan suatu ketrampilan yang diperintahkan. Umumnya dilakukan pada akhir suatu tahapan pembelajaran dan jawaban yang diberikan memiliki kemungkinan benar atau salah. Assesmen, termasuk juga tes, menghasilkan informasi pencapaian relatif terhadap tujuan pembelajaran.

Assesmen dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu assesmen sumatif (*summative assessment*) dan assesmen formatif (*formative assessment*). *Assessment* sumatif digunakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian subjek setelah menyelesaikan suatu aktivitas. Umumnya hasil dari assesmen sumatif dimasukkan ke dalam komponen penilaian. *Assessment* formatif dilakukan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) dan umpan maju (*feedforward*) dari proses kegiatan yang dilakukan dan/atau untuk mendukung perencanaan berkelanjutan.

Setelah diperoleh hasil assesmen maka dilakukan proses pengukuran. Pengukuran adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas terhadap

hasil assesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Istilah penilaian (*grading*) dapat digunakan secara khusus untuk proses pengukuran ini. Setelah dilakukan pengukuran maka hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil pengukuran/*assessment*.

Gambar 6.1

Assessment Teori-Teori dan Data Awal



Sumber : Web sigana

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu peneliti melakukan asesessment terhadap subjek dampangan di Desa Depok. Meliputi tokoh dan *stakeholder*, lokasi dan karakteristik wilayah dampangan, masalah kebencanaan yang pernah terjadi sebelumnya, kultur dan adat istiadat masyarakat Desa Depok, komunitas-komunitas di masyarakat, serta teori dan materi yang akan di implementasikan atau bahkan dibenturkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Sehingga dari informasi-informasi awal dan data-data awal sebelum melakukan penelitian dan pendampingan peneliti sudah siap dan tahu harus melakukan apa jika bertemu dengan masalah apa.

Gambar 6.2

Mengikuti Kegiatan Desa Sebagai Cara Mencari Data Awal Mengenai Desa



Sumber : Dokumentasi peneliti

Gambar diatas adalah ketika kegiatan implementasi program rutin pembinaan masyarakat Desa Depok dengan mengundang seluruh ketua RT, ketua RW, anggota BPD Depok, kader posyandu dan jajaran pemerintah desa. Kegiatan rutinannya meliputi arisan RT sebagai media mempererat jalinan persaudaraan antar masyarakat dan sebagai media pemerintah melakukan sosialisasi dan menampung aspirasi dari seluruh masyarakat baik keluhan maupun saran untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap *senin wage*¹.

B. Inkulturasi

Inkulturasi adalah sejenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok umat, kebiasaan, bahasa, dan perilaku yang biasa terdapat pada suatu tempat. Ada pengarang yang lebih suka menggunakan istilah *enkulturasi* daripada *inkulturasi*, prefik *in* dalam bahasa Inggris bisa berarti negatif, seperti misalnya dalam

¹ Salah satu hari dalam penanggalan jawa.

kata *incult*. Dalam bahasa Indonesia, konotasi negatif itu tidak terasa dan istilah inkulturasi sudah lazim dipergunakan. Proses penyesuaian dalam tahap ini tidak jauh berbeda dengan proses adaptasi pada umumnya. Adaptasi dengan gaya bahasa, penuturan dan dialek masyarakat lokal yang sedikit berbeda dengan *background* peneliti bukan menjadi penghalang dalam melakukan penelitian dan pendampingan.

Berbicara inkulturasi adalah berbicara mengenai gaya bersosialisasi. Gaya bersosialisasi yang lazim dilakukan oleh pihak asing (*outsider*) dalam hal ini peneliti dengan masyarakat lokal (*insider*) adalah sedikit canggung yang kemudian menjadi semakin akrab dan sedikit santai. Hingga level merasa seperti keluarga sendiri adalah titik dimana inkulturasi tersebut dikatakan berhasil. Seperti halnya keluarga yang selalu menggunakan asas keterbukaan dan saling membantu satu sama lain. Hubungan masyarakat dan peneliti juga demikian.

Keterbukaan masyarakat kepada peneliti diperlukan agar data-data atau informasi-informasi yang terjadi dilapangan dapat distrukturkan dan dibingkai dengan teori menjadi suatu informasi baru yang akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Disinilah asas tolong menolong satu sama lain berperan. Masyarakat mendapat hasil penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan atau keterbukaan informasi baru mengenai wilayah atau informasi kebencanaan yang belum mereka ketahui sebelumnya. Sedangkan peneliti mendapatkan pengalaman belajar bersama masyarakat.

Spirit dakwah yang dilakukan dalam menjalin *trust* dengan masyarakat adalah dengan mengaplikasikan nilai-nilai dan karakter khas mahasiswa Pengembangan

Masyarakat Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjunjung tinggi etika dan tata krama dalam berkomunikasi, berpakaian dan berperilaku. Hal ini tentu mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan khas yang dimaksud adalah dengan turut serta dalam kegiatan yasin tahlil kelompok ibu-ibu Dusun Soko yang rutin diselenggarakan pada malam senin selepas *maghrib*. Selalu mengucapkan salam dan cium tangan kepada orang yang lebih tua jika bertemu, mengucapkan *nyuwun sewu*² dan *Amit*. Tentunya selain pengetahuan dan ilmu, tata krama dan akhlak bersosial menjadi prioritas dalam proses penelitian dan pendampingan ini.

Pada tanggal 10 November 2016, peneliti mengikuti kegiatan upacara hari pahlawan yang diselenggarakan oleh jajaran pemerintah Kecamatan Bendungan. Setelah kegiatan tersebut peneliti bertemu dengan jajaran pemerintah Kecamatan Bendungan untuk mengutarakan maksud dan tujuan serta menyampaikan izin atas kegiatan penelitian dan pendampingan terhadap masyarakat Desa Depok dalam waktu 3 bulan. Hal ini diterima dan mendapat respon positif dari kepala Kecamatan Bendungan. Bahkan mengkomando seluruh jajaran pemerintah dan instansi terkait di bawah naungan kantor kecamatan untuk memberi kemudahan atas akses data dan informasi yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian.

Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Kepala Kecamatan Bendungan bapak Nur Kholik, juga dihadiri oleh kepala kepolisian sektor Bendungan bapak Sukeni, serta seluruh kepala Desa dan Sekertaris Desa di Kecamatan Bendungan. Dengan harapan

² Permisi, dalam Bahasa Indonesia.

dari hadirnya para pemangku kebijakan dalam forum ini akan membentuk jaringan *stakeholder* yang memiliki kekuatan dan kuasa dalam mengimplementasikan rekomendasi atau hasil dari penelitian yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan. Sehingga meskipun tidak ada jaminan, setidaknya arah dalam keberlanjutan program dikemudian hari. Untuk transformasi masyarakat kearah yang lebih baik dengan terstruktur, sistematis, sporadis dan masif.

Gambar 6.3

Diterima sebagai mahasiswa PPL UIN Sunan Ampel oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Bendungan



Sumber : Dokumentasi peneliti

Karena pertama kali datang di Desa Depok pada tanggal 23 Oktober 2016 pukul 21.00 WIB, dan langsung menginap di rumah bapak Kepala Desa Depok, bapak Suroto. Sehingga inkulturasi baru dimulai pada keesokan harinya. Namun, karena ada beberapa faktor peneliti dan kepala desa secepat untuk menggunakan rumah bapak Surmaji sebagai tempat tinggal sementara selama penelitian dan pendampingan ini dilaksanaka. Sama-sama berada di Dusun Soko namun berbeda RT. Sehingga lebih

dekat dengan masyarakat dan akses jalan serta jaringan signal menjadi pertimbangan dalam berkomunikasi.

Proses inkultuturasi berjalan dengan lancar, karena sambutan dan respon masyarakat Desa Depok sangat positif dan mendukung adanya penelitian dan pendampingan di desanya. Alasan mendasarnya karena belum ada kegiatan semacam ini yang dilakukan di desa mereka. Serta sedikit rasa kasian kepada peneliti karena dianggap jauh-jauh datang dari Surabaya ke desa terpencil dan sendirian melakukan penelitian sebagai kegiatan wajib dalam pembelajaran³. Selain melakukan inkulturasi kepada para tetangga, inkulturasi juga dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan Desa Depok, majlis yasinan dan tahlil serta ke berbagai institusi seperti sekolah dan puskesmas di lingkungan Desa Depok.

Gambar 6.4

Bersama anak-anak SDN 03 Desa Depok dan guru pendamping



Sumber : Dokumentasi peneliti

³ Wawancara dengan ibu Tutik (30 tahun), masyarakat dusun Soko, tanggal 25 Oktober 2016, plk. 10.00 WIB.

C. Menepakati Agenda Riset Bersama

Setelah melakukan *assessment* dan inkulturasi dengan masyarakat berjalan kemudian mulai mengadakan *lobby-lobby* dengan *stakeholder* terkait. *stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki peran dan fungsi sentral dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Mulai dari penemuan isu masalah, perencanaan strategis, melakukan aksi, pendanaan hingga evaluasi untuk keberlanjutan program. Sehingga ada dan tidak adanya perubahan ke arah yang lebih baik adalah tanggung jawab penuh dari *stakeholder* yang terlibat.

Pemetaan *stakeholder* adalah proses krusial, bongkar pasang mitra juga sempat dialami oleh peneliti. Karena peneliti membawa isu kebencanaan sehingga sedikit susah mencari *stakeholder* yang relevan yang tahu, mau dan mampu melakukan proses demi proses dalam penelitian dan menjadi subjek dampingan. Dalam hal ini pertama yang dihubungi adalah pemerintah Desa Depok yang diwakili oleh bapak kepala desa dan bapak sekretaris desa pak suroto dan pak surmaji. Beliau adalah pintu pertama komunikasi tentang maksud dan tujuan diadakannya riset partisipatif berbasis isu kebencanaan di desa mereka.

Karena bertepatan dengan diadakannya rapat rutin oleh pemerintah Desa Depok dengan jajaran ketua RT, ketua RW dan anggota BPD pada hari itu tepat diadakannya musyawarah, acara tersebut terbingkai dalam kegiatan arisan RT Desa Depok. Semacam forum komunikasi antara pemerintah desa dengan penyambung aspirasi paling kecil yaitu para ketua RT. Dalam melaksanakan proses menepakati agenda riset bersama masyarakat disepakati bahwa untuk masalah administrasi dan

keperluan data tentang desa dapat diakses langsung ke bagian administrasi desa, bapak Surmaji sebagai sekretaris desa membuka akses informasi dan data yang diperlukan. Komunikasi antara peneliti dan *stakeholder* dalam hal ini pemerintah desa menjadi mudah. Tahapan selanjutnya untuk menggali data-data dan informasi-informasi kebencanaan yang belum tersedia di pihak pemerintah desa peneliti bersama kepala desa dan sekretaris desa menyepakati untuk langsung terjun di masyarakat. Menghimpun informasi berbasis partisipasi masyarakat mengenai kebencanaan yang ada di Desa Depok.

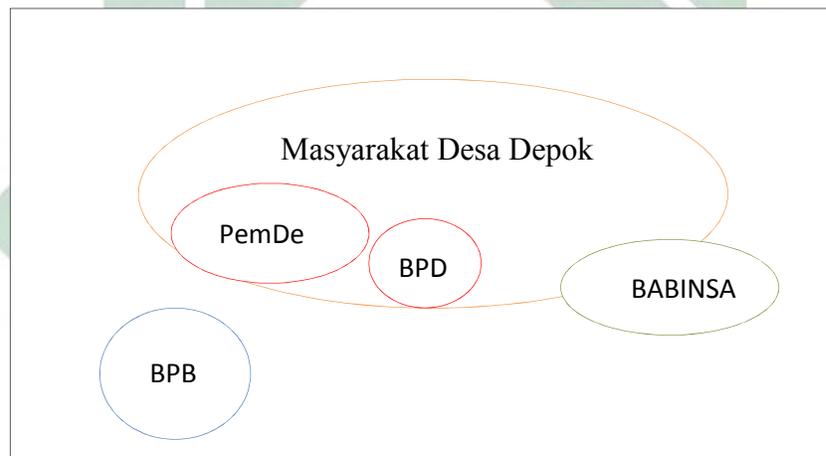
Stakeholder yang terkait dalam hal ini untuk memfasilitatori kegiatan penggalian data dan informasi awal dengan masyarakat, maka jajaran kepala dusun ambil bagian. Empat orang kepala dusun dari Dusun Soko, Kebunagung, Banaran dan Joho sangat antusias menjadi leader memandu dan membantu mengumpulkan masyarakat dalam FGD yang akan dilaksanakan dalam minggu ke-3 penelitian dan pendampingan di Desa Depok. Demikian halnya dengan anggota TNI yang bertugas sebagai BABINSA di Desa Depok, bapak Wiyono. Tugas BABINSA di desa tidak lain untuk memastikan desa aman dan tentram. Sehingga peran BABINSA dengan respon yang positif juga turut membantu dan membimbing pelaksanaan dan penelitian di Desa Depok.

Setelah terjalin kesepakatan dan kerjasama dengan stakeholder lokal, selanjutnya adalah menjalin komunikasi kepada instansi terkait. Masalah perizinan untuk penelitian dan pendampingan pada pemerintah kecamatan bendungan. Respon kepala kecamatan pak Nur Kholik juga mendukung serta bersedia memberikan akses dan kemudahan untuk kelancaran penelitian dan pendampingan di wilayahnya. Dalam

penelitian dan pendampingan urusan kebencanaan tentu sangat relevan jika menjadikan instansi-instansi terkait menjadi partner dan pembimbing di lapangan selain dosen lapangan. Seperti BPBD Kab. Trenggalek terutama tim PUSDALOPS yang mengelola bank data kebencanaan dan tempat tenaga ahli kebencanaan bertukar pikiran dengan peneliti serta memberi masukan untuk kebaikan bersama.

Diagram 6.1

Diagram venn stakeholder terkait dalam penelitian dan pendampingan



Sumber : Analisis peneliti

Untuk mengetahui posisi sosial dan kekuatan politik untuk Penempatan para aktor baik institusi maupun individu dalam kuadran memiliki beberapa karakteristik. Diantaranya adalah kotak A diisi oleh aktor yang mempunyai kekuatan besar (posisi sosial dan kekuatan politik), namun mempunyai kepentingan atau peranan kecil. kotak selanjutnya adalah kotak B, kotak ini diisi oleh aktor yang memiliki kekuatan yang besar dan kepentingan/peranan yang tinggi pula. Kotak C ini berisi aktor dengan kekuatan yang rendah, namun mempunyai kepentingan atau peranan yang tinggi dalam masyarakat.

Dan yang terakhir kotak D ini berisi aktor-aktor yang kekuatannya rendah dan kepentingan/perannya rendah pula. tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Tabel 6.1

Kuadran posisi sosial dan peran politik stakeholder

High Power	Kuadran stakeholder	
	A	B
↑	Pemerintah Desa Depok BPBD kab. Trenggalek	Pak Surmaji (SekDes) Pak Babinsa Wiyono
	C Kelompok yasinan ibu- ibu Dusun Soko Bu bidan Katini Pak Rani (BPD) Pak Purwadi (Perhutani)	D Kelompok Arisan RT Kelompok Rentan Desa Depok
	Low Interest →	

Sumber : analisa Peneliti

1. Kotak A: *High Power and Low Interest*, mempunyai kekuatan besar (posisi sosial dan kekuatan politik), namun mempunyai kepentingan atau peranan kecil. Di kotak A diisi oleh pemerintah Desa Depok dan BPBD kabupaten Trenggalek yang secara posisi dan institusi kedua lembaga milik negara ini memiliki kekuatan besar dalam mengimplementasikan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, namun karena kesibukan dan skala prioritas dalam memandang isu bencana, maka peranan kedua lembaga ini masih terbilang kecil.
2. Kotak B: *High Power and High Interest*, diisi oleh aktor yang memiliki kekuatan yang besar dan kepentingan/peranan yang tinggi pula. Pada dasarnya beberapa orang saja sebenarnya cukup untuk menjadi *local leader* bagi masyarakat desa yang lainnya. Dalam kotak ini beberapa orang diantaranya adalah tokoh dengan kekuatan

dan peranan dalam masyarakat tinggi. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah sekretaris Desa Depok, bapak Surmaji dan anggota Babinsa Desa Depok bapak Wiyono yang sangat berperan aktif untuk *aware* terhadap isu-isu bencana di Desa Depok.

3. Kotak C: *Low Power and High Interest*, berisi aktor dengan kekuatan yang rendah, namun mempunyai kepentingan atau peranan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti Kelompok yasinan ibu-ibu Dusun Soko, Bu bidan Katini, Pak Rani (BPD), Pak Purwadi (Perhutani). Tokoh-tokoh di atas serta instansi penyedia layanan kesehatan dalam hal ini puskesmas dan puskesmas pembantu beserta seluruh tenaga medis juga menjadi bagian penting adalah gambaran masyarakat yang memiliki peranan besar dalam upaya pengurangan risiko bencana, namun tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki kemampuan (*power*).
4. Kotak D: *Low Power and Low Interest*, ini berisi aktor-aktor yang kekuatannya rendah dan kepentingan/perannya rendah pula. Selain dengan stakeholder yang terlibat di atas beberapa stakeholder yang lain seperti kelompok arisan RT dan kelompok rentan yang juga menjadi bagian dalam penelitian dan pendampingan ini. Tidak dapat dipungkiri kelompok rentan yang juga menjadi bagian dalam masyarakat Depok adalah subjek pendampingan, karena sesungguhnya merekalah yang harus didampingi menjadi komunitas tangguh. Untuk lebih lengkap tentang fungsi dan perannya akan lebih lengkap dijabarkan dalam tabel berikut;

Tabel 6.2
Analisa Stakeholder

No.	Institusi	Karakteristik	Resource	Bentuk keterlibatan	Tindakan yang harus di lakukan
1.	Kelompok rentan	Masyarakat yang rentan terkena dampak bencana tanah longsor	Memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pengurangan risiko bencana	Sebagai subjek yang menjalankan upaya pengurangan risiko bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlibat aktif dalam kampanye dan peningkatan pemahaman dengan informasi tentang pengurangan risiko bencana 2. Merubah paradigma tentang bencana yang ditangani dengan responsive menjadi preventive dan melakukan PRB
2.	Pemerintah Desa	Penyelenggara pemerintah desa dan pengambil kebijakan desa, termasuk kebijakan penanganan kebencanaan	Memiliki otoritas tertinggi di tingkat desa		
3.	Kelompok Arisan RT	Wadah ketua RT, ketua RW, Kepala Dusun dan jajaran Pemerintah Desa serta BPD	Keanggotaan yang terstruktur dan legal di bawah pemerintah desa, sumber dana dapat dihimpun oleh anggota	1. Sebagai kelompok utama dalam riset partisipatif untuk perubahan dalam PRB di desa	Memberikan arahan dan informasi serta membangun kesadaran dengan masyarakat tentang kebencanaan dan upaya PRB di desa

				<p>2. Termasuk inisiasi dan perumusan strategi pemecahan masalah</p> <p>3. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa sebagai pemegang otoritas penuh untuk pembangunan dan pengembangan desa</p>	
4.	Puskesmas	Sebagai lembaga kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat desa	Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang rentan terganggu kesehatannya	Pemberi informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebencanaan kepada masyarakat	Memberikan arahan kepada masyarakat melalui pendekatan intra personal maupun ekstra personal tentang kesehatan dan kebencanaan
5.	BPBD kab. Trenggalek	Lembaga pemerintah yang focus menangani isu-isu kebencanaan dan lembaga	Penyedia data, kebencanaan, pengetahuan dan informasi PRB	Sebagai narasumber ahli tentang kebencanaan dan pendamping kelompok tangguh yang	Pemberi informasi tentang kebencanaan dan mendampingi desa dalam PRB

		yang ahli kebencanaan		akan di bentuk di desa	
--	--	--------------------------	--	---------------------------	--

Sumber : hasil analisa peneliti

Dari komunikasi yang dilakukan dengan stakeholder-stakeholder terkait di atas disepakatilah beberapa poin penting untuk dilakukan riset bersama tentang masalah kebencanaan. Agenda riset yang pertama melibatkan kepala desa dengan sekertaris desa dengan peneliti menyepakati wilayah Desa Depok rawan longsor. Karena sering terjadi longsor skala kecil hingga besar, poin kedua diperlukannya komunitas yang dibentuk di masyarakat sebagai *pioneer* kesiapsiagaan di Desa Depok. dan menyepakati kelompok arisan RT yang dilakukan setiap hari senin wage sebagai kelompok yang paling relevan, dari segi gender, intensitas pertemuan yang pasti, serta sebagai penguatan kearifan lokal masyarakat desa yang suka gotong royong dan tidak individualis sebagai modal dikukuhkan kelak sebagai kelompok tangguh bencana yang solid.

Riset kedua melibatkan kepala-kepala dusun dengan ketua RT sebagai perwakilan masyarakat. Dalam FGD selain menggali data kebencanaan juga melakukan penilaian risiko bencana serta melakukan pemetaan daerah rawan, kelompok rentan bencana, kapasitas masyarakat meliputi infrastruktur dan pengetahuan lokal dalam penanggulangan bencana. Kegiatan diatas juga dilakukan dengan BABINSA Desa Depok untuk memperkuat atau validasi data dan validasi sumber.

Riset ketiga dilakukan dengan BPBD Kab. Trenggalek sebagai tenaga ahli bencana yang membantu mentrasformasikan data sosial yang telah dihimpun bersama

masyarakat menjadi data spasial berupa peta rawan dan data statistic yang siap dipergunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dalam bentuk laporan rekomendasi. Masukan dan penambahan-penambahan informasi dari pihak BPBD Kab. Trenggalek selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai aksi strategis menjadikan Desa Depok desa tangguh bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana yang sukses dilakukan.

Tabel 6.3

Jadwal riset yang telah disepakati

No.	Nama kegiatan	Pelaksanaan (Minggu)			
		Okt	Nov	Des	Jan
1.	Pemetaan Awal (<i>preliminary mapping</i>)	x			
2.	Penentuan Agenda Riset untuk Perubahan Sosial	x			
3.	Pemetaan Partisipatif (<i>Partisipatory Mapping</i>)		xx		
4.	Merumuskan Masalah Kemanusiaan		X xx		
5.	Menyusun Strategi Gerakan		X x	xx	
6.	Pengorganisasian Masyarakat			xxx	
7.	Melancarkan Aksi Perubahan			xx	xxxx
8.	Membangun Pusat-Pusat Belajar Masyarakat			x	xxxx
9.	Reflesi				xx
10.	Meluaskan Skala Gerakan Dukungan				xxx

Sumber : Hasil FGD dengan masyarakat

D. Merumuskan Masalah Bersama Komunitas

Penelitian ini menggunakan metodologi PAR dengan pendekatan PRA, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan metodologi penelitian bahwa PAR adalah sebuah konsep penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam melakukan perubahan dan

perbaikan ke arah yang lebih baik⁴. PAR adalah salah satu cara atau metode yang selalu menggunakan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah-langkah penelitian. Dimulai dengan merumuskan masalah di komunitas, menyusun rencana aksi strategis pemecahan masalah, hingga eksekusi aksi pemecahan masalah. Seluruhnya berbasis komunitas atau masyarakat.

PRA (*participatory rural appraisal*) atau pemahaman pedesaan berdasarkan peran serta secara umum melakukan pendekatan kolektif, identifikasi, dan klasifikasi masalah yang ada dalam suatu wilayah pedesaan. PRA sendiri adalah sebuah teknik untuk menyusun dan mengembangkan program operasional dalam pembangunan tingkat desa. Metode atau teknik ini ditempuh dengan memobilisasi sumber daya manusia dan alam setempat, menstabilkan dan meningkatkan kekuatan masyarakat setempat serta mampu pula melestarikan sumber daya setempat. Seluruh prosesnya juga berbasis komunitas atau masyarakat.

Namun, karena keterbatasan tempat dan waktu dalam pemetaan masalah serta aset yang dimiliki komunitas, maka kegiatan ini dirangkai dalam suatu rangkaian acara FGD dengan masing-masing perwakilan Dusun. Untuk melaksanakan kegiatan FGD tersebut peneliti menghubungi kepala desa dan sekretaris desa untuk mengkonfirmasi langkah-langkah yang harus ditempuh. Arahan dari kepala desa dan sekretaris desa adalah dengan mengkonfirmasi langsung pada masing-masing kepala dusun untuk tanggal, waktu, tempat dan kebutuhan lainnya agar kegiatan FGD berjalan lancar.

⁴ Agus Afandi. dkk, "modul *participatory action research (par): untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*", lppm uin sunan ampel surabaya, surabaya:2016, hal.91

Masing-masing kepala dusun dan peneliti menyepakati jika acara FGD untuk pemetaan masalah komunitas adalah dengan menyebar undangan kepada masing-masing ketua RT, ketua RW dan anggota BPD yang berdomisili di dusun yang akan ditempati sebagai lokasi FGD. Untuk tanggal dan waktu masing-masing dusun memilih hari yang tidak berjauhan. Dimulai oleh dusun Joho yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2016 pukul 10.23 WIB acara dimulai, padahal dalam undangan tercantum waktu pelaksanaannya adalah pukul 09.00 WIB. Masyarakat dusun Joho yang mayoritas petani dan peternak harus mengambil rumput dahulu sebelum menghadiri acara FGD, karena kegiatan mengambil rumput adalah kegiatan sehari-hari dan prioritas bagi masyarakat dusun Joho.

Sedangkan untuk dusun Banaran dan Dusun Kebunagung dilakukan pada tanggal 08 dan 09 November 2016. Bertempat di rumah bapak Puryani selaku kepala dusun Banaran dan Aula kantor balai desa dipilih untuk tempat dilakukannya FGD dusun Kebunagung. Masalah waktu tidak jauh beda dengan dusun Joho karena mayoritas kegiatan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan untuk mengambil rumput di pagi hari membuat acara FGD dilakukan sedikit siang. Untuk dusun Soko, kegiatan FGD dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 dilakukan di rumah bapak Surmaji (RT 03).

Kegiatan FGD mendapat respon yang luar biasa dari para undangan, dalam hal ini adalah para ketua RT, ketua RW, anggota BPD, Babinsa Desa Depok pak Wiyono dan beberapa perangkat desa yang juga turut hadir. Peneliti hanya memberi beberapa pertanyaan mengenai isu yang diangkat, kemudian masyarakat bercerita sesuai dengan

yang terjadi di desa ini, berdiskusi dua arah, sesekali meminta penjelasan dan pembenaran kepada yang lain. Komunikasi mengalir dan mulai cair ketika diantara bapak-bapak tersebut ada yang melucu dengan nada bercanda.

Tabel 6.4

Jadwal FGD untuk merumuskan masalah komunitas

No.	Tanggal	Tempat	Temuan masalah
1.	Senin, 07 November 2016	Rumah kepala dusun Joho (Mulani)	<ul style="list-style-type: none"> - Pernah terjadi longsor skala besar tahun 2009 - Pernah terjadi kekeringan hingga 5 bulan tanpa air, akses air susah dan jauh - Kelompok rentan (lansia sangat tinggi) - Infrastruktur jalan dan jembatan perlu peremajaan - Posisi yang di balik bukit sehingga akses komunikasi susah (signal) - Ekonomi masyarakat yang masih prasejahtera - Belum ada pendidikan atau informasi kebencanaan - Trauma dan dampak psikologis akibat longsor tahun 2009 masih melekat di benak masyarakat (terutama masyarakat yang direlokasi)
2.	Selasa, 08 November 2016	Rumah kepala dusun Banaran (Puryani)	<ul style="list-style-type: none"> - Satu rumah minimal satu lansia (tingginya jumlah kelompok rentan (lansia)) - Belum pernah ada pendidikan atau informasi kebencanaan sebelumnya - Ekonomi masyarakat dusun yang masih banyak prasejahtera - Signal susah untuk berkomunikasi

			<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi longsor-longsor kecil di lereng jalan dusun
3.	Rabu, 09 November 2016	Aula kantor kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana tanah longsor rendah - Belum ada kelompok atau komunitas yang fokus dalam masalah kebencanaan - Isu kebencanaan tidak seberapa penting menurut masyarakat
4.	Jumat, 11 November 2016	Rumah sekretaris desa (Surmaji)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran akan bahaya tanah longsor ada, namun masyarakat tidak melakukan upaya pencegahan (apatis) - Paradigma masyarakat yang menggantungkan urusan bencana kepada pemerintah - Belum ada upaya pengurangan risiko bencana - Beberapa masyarakat bahkan menambang pasir di lereng sehingga pernah terjadi tanah longsor pada tahun 2013 (RT 07) - Tidak ada langkah reboisasi di sekitar aliran sungai yang terkena erosi sungai - Peran kelompok masyarakat (komunitas kartar/remas/intitusi yang lain) tidak maksimal (vakum).

Sumber : FGD dengan masyarakat masing-masing dusun

Fenomena atau isu bencana alam bukan prioritas dalam kehidupan masyarakat. Mengutip dokumen pembentukannya, “Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah sebuah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/ tempat untuk program penanggulangan bencana” yang diluncurkan pada tahun 2011 oleh

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. KSB dibentuk dengan maksud “untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat”⁵.

Gambar 6.5

Proses FGD dengan masyarakat



Sumber : Dokumentasi peneliti

⁵ Muhammad Belanawane S, “Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Indonesia: Politik Pembangunan Dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan,” *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 5, No. 01, Jakarta:2015, hal. 310.,

Karena menurut mereka kejadian tanah longsor secara frekuensi memang sering terjadi. Namun dari segi kuantitas atau besar kecilnya bencana tanah longsor yang terjadi di lingkungan desa cenderung kecil. Kejadian besar dan menimbulkan korban jiwa memang tidak pernah. Namun jika kerugian harta dan dampak psikologis beberapa kali telah terjadi. Di tahun 2008 saat intensitas hujan tinggi membuat longsor besar sehingga membuat 2 RT di relokasi ke tempat yang lebih aman. Ratusan KK mengungsi dan di reloaksi ke tempat yang lebih aman (Sekarang RT 29 dan RT 30) Dusun Joho.

Kegiatan di atas juga termasuk dalam Merumuskan masalah sosial, beberapa penilaian-penilaian terhadap ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana.

1. Menilai Ancaman

Penilaian ancaman merupakan upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman yang terdapat di desa/kelurahan. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.

2. Menilai Kerentanan

Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi tentang kondisi-

kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman di desa/kelurahan sasaran, yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan properti dan kerugian-kerugian lainnya. Penilaian kerentanan diharapkan juga dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di masyarakat, yang bila bertemu ancaman dapat menjadi bencana.

3. Menilai Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak bencana. Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di desa/kelurahan pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.

4. Menganalisis Risiko Bencana

Analisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan; serta menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di desa/kelurahan sasaran. Hasil analisis ini berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman,

kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang ada. Bila ancaman yang dihadapi banyak, penilai dapat memprioritaskan beberapa ancaman tertentu berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini merupakan dasar untuk mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana. Komponen penyusun berdasarkan hasil kajian dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka mengembangkan desa/kelurahan yang tangguh.

E. Membuat Perencanaan Program Strategis

Beberapa masalah diatas diakibatkan oleh faktor manusia, kelembagaan dan kebijakan yang belum menerapkan PRB dalam bencana tanah longsor. Dari faktor manusia, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PRB dikarenakan belum adanya pendidikan dan pemberian informasi mengenai PRB. Dari faktor kelembagaan belum terbentuknya kelompok atau komunitas yang focus dalam PRB tanah longsor, dimana pengorganisasian dan inisiasi pembentukan komunitas juga belum tercetus. Sedangkan di tingkat pemerintahan dalam hal ini belum ada implementasi program yang dapat mengurangi risiko tanah longsor di desa. Hal ini memerlukan fasilitas dan advokasi dari masyarakat bersama peneliti.

Faktor-faktor seperti belum adanya pendidikan dan pemberian informasi mengenai PRB, pengorganisasian dan inisiasi pembentukan komunitas juga belum tercetus dan implementasi program yang dapat mengurangi risiko tanah longsor disebut sebagai akar masalah. Hingga strategi pemecahan akar masalah yang harus dilakukan yakni;

1. Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan
2. Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan
3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan
4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PRB
5. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan

Langkah strategis diatas disusun dan dikonsultasikan bersama masyarakat dan stakeholder tenaga ahli, atau BPBD Kab. Trenggalek. Sehingga program yang telah disusun bersama diatas dapat dijalankan secara partisipatif dan bukan top-down. Pelibatan masyarakat sangat penting, karena mereka adalah subjek dari penelitian dan pendampingan ini. Masyarakat menjadi tokoh sentral dalam merumuskan masalahnya hingga menentukan langkah strategis dalam pemecahan masalah secara mandiri. Dengan demikian masyarakat secara tidak langsung telah menjadi masyarakat yang terbangun kesadarannya secara kritis dan membuat suatu perubahan (*transformasi social*) kearah yang lebih baik.

Tabel 6.5

Strategi pemecahan masalah

Tujuan akhir (goal)	Pengurangan risiko bencana tanah longsor di Desa Depok
Tujuan (<i>purpose</i>)	Membangun kesiapan siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor
Hasil (<i>output</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya kesadaran masyarakat tentang PRB 2. Terbentuknya kelompok/komunitas yang focus dalam PRB tanah longsor 3. Implementasi program tentang upaya PRB di pemerintahan desa

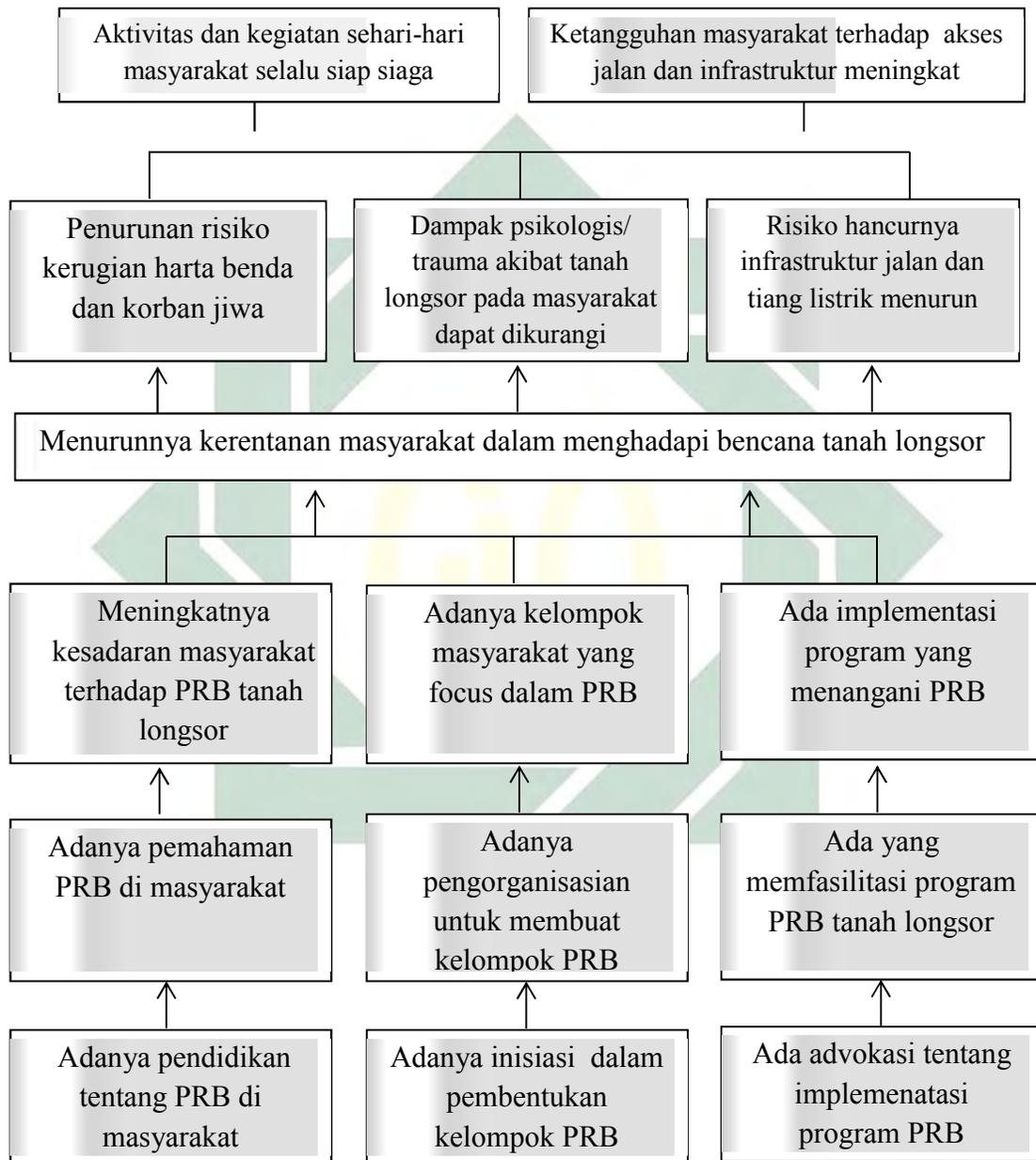
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan/penyadaran komunitas dalam RPB tanah longsor <ol style="list-style-type: none"> 1.1 kampanye dan sosialisasi PRB di masyarakat 1.2 membuat zonasi daerah rawan, jalur evakuasi dan titik kumpul bersama masyarakat 1.3 pembuatan media informasi untuk peringatan dini berupa rambu-rambu dll. 2. Pembentukan kelompok/komunitas yang focus dalam upaya PRB di desa <ol style="list-style-type: none"> 2.1 mengidentifikasi kelompok masyarakat yang telah ada 2.2 mengorganisir pembentukan kelompok/komunitas yang focus dalam upaya PRB di Desa 2.3 menyusun struktur organisasi, visi misi, kelompok kerja, penanggung jawab dan sumber dana 2.4 melancarkan aksi gerakan PRB di desa 3. advokasi agar pemerintah desa segera mengimplementasikan program tentang upaya PRB di desa <ol style="list-style-type: none"> 3.1 menyusun dokumen rencana aksi komunitas 3.2 mengupayakan kelompok siaga di desa berstatus legal dibawah naungan payung hukum pemerintah desa. 3.3 Koordinasi lumbung bencana dan dana siaga sebagai upaya PRB di desa.
----------	---

Sumber : BPBD Kab. Trenggalek dan Pemerintah Desa Depok

Jika di bagian atas telah dibahas mengenai temuan masalah yang disusun dalam pohon masalah, maka kegiatan menyusun strategi gerakan adalah kegiatan untuk mengubah masalah menjadi harapan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Masalah - masalah yang telah ditemukan dicari solusi agar menjadi suatu perubahan kearah lebih baik. Perubahan tersebut merupakan harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh komunitas. Dalam hal ini adalah merubah ancaman dan kerawanan menjadi ketangguhan.

Bagan 6.1

Pohon Harapan



Sumber : hasil FGD dan Rekomendasi BPBD Kab. Trenggalek

Inti harapan dari komunitas adalah menurunnya tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Agar risiko-risiko yang mengancam komunitas dapat dikurangi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pengurangan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui pendidikan atau kampanye. Dengan membentuk wadah atau lembaga komunitas yang berfokus pada isu kebencanaan sebagai media pengorganisasian masyarakat. Sedangkan pembenahan sistem dan pengintegrasian peraturan dan kebijakan oleh pemerintah desa juga dapat diadvokasi. Tujuan dari semua kegiatan tersebut adalah agar masyarakat senantiasa menerapkan budaya aman atau siap siaga bencana tanah longsor dan peningkatan posisi masyarakat yang sebelumnya rawan menjadi masyarakat yang tangguh bencana.

F. Membangun Jaringan Stakeholder

1. Pemerintah Desa

Peran pemerintah sangat sentral dalam kegiatan ini. Membangun komunikasi dan penyamaan visi, misi serta tujuan dari kegiatan ini menjadi faktor yang paling penting. Selain itu faktor hasil atau dampak dapat dimonitoring bersama. Seluruh perangkat desa selalu terlibat langsung dalam seluruh kegiatan. Karena peran dan fungsi yang begitu sentral ini, maka beberapa proses kegiatan penelitian dan pendampingan yang dilakukan di Desa Depok tidak seluruhnya partisipatif.

Aspek keterbatasan waktu dan tenaga dalam pengumpulan masyarakat untuk selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi alasan dasar. Beberapa diantaranya yang menggunakan asas keterwakilan oleh pemerintah desa adalah saat

pemilihan anggota kelompok tangguh bencana Desa Depok pada tanggal 17 Januari 2016. Pemilihan ini dilakukan di kantor pemerintah Desa Depok dengan beberapa anggota BPD dan diwakili oleh beberapa ketua RT dan ketua RW saja. Karena menurut pemerintah desa, jika dilakukan dalam forum maka akan memakan waktu yang lama, dan biasanya menjadi tertunda.

Kerana peneliti mempercayai kebiasaan masyarakat yang bertindak demikian maka kegiatan tersebut tetap berjalan dengan lancar. Kemudian ditindak lanjuti menjadi penerbitan SK kepala desa. Masyarakat dan kelompok tangguh yang telah dibentuk diorganisir dalam satu forum kemudian dikukuhkan oleh kepala desa. Sehingga masalah ketidakterediaan wadah komunitas dalam pengurangan risiko bencana dapat terselesaikan.

Gambar 6.6

Proses Pembentukan kelompok tangguh bencana



Sumber : dokumentasi peneliti

2. Kelompok arisan RT

Membangun komunikasi kepada kelompok arisan RT ini bermula pada acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Depok pada *senin wage* bulan oktober

tahun 2016. Hanya beberapa ketua RT yang dapat diajak berkomunikasi karena masih awal dan masih dalam acara sehingga tidak seluruh anggota dapat diajak berinteraksi. Namun seiring berjalannya waktu, seluruh ketua RT, ketua RW, BPD dan para kepala dusun dapat berinteraksi dalam berbagai acara. Salah satunya adalah saat acara FGD di masing-masing dusun di Desa Depok. Berikut adalah data ketua RT di Desa Depok;

Tabel 6.6
Data ketua RT Desa Depok

Dusun	RW	RT	Nama Ketua RT
Soko (Suyono)	I	01	Kurdi
		02	Hilal
		03	Suhuri
	II	04	Kamirin
		05	Saidi
		06	Miseran
	III	07	Wagiman
		08	Toimin
	IV	09	Subani
		10	Lamidi
Kebunagung (Slamet Widodo)	V	11	Marsup
		12	Bani
		13	Puryani
	VI	14	Masrip
		15	Bari
		16	Sutini
	VII	17	Sulastri
		18	Juari
		19	Ngali
Banaran (Puryani)	VIII	20	Mujito dan Bibit Pande
		21	Margono
		22	Senen
	IX	23	Sarudi
		24	Ladi
	X	25	Tukiran dan Sumiran
		26	Bandi
		27	Jasmani

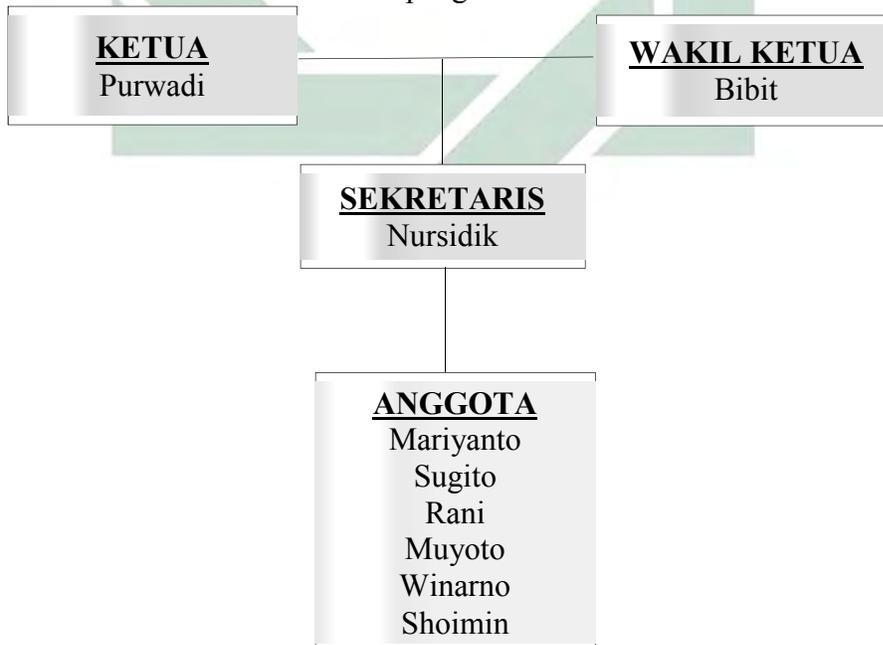
		28	Ladi
Joho (Mulani)	XI	29	Jasmani dan Gani
		30	Bintoro
		31	Jamari

Sumber : FGD bersama masyarakat

3. BPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat)

BPD adalah institusi di bawah naungan pemerintah desa. BPD merupakan singkatan dari badan pemberdayaan masyarakat yang berperan dan dipercaya oleh masyarakat juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan di desa. Tidak dapat dipungkiri peran BPD dalam pembangunan desa sangat fundamental. Tugas pokok dari BPD adalah sebagai penjematan dan penampung aspirasi masyarakat di desa untuk kemudian diimplementasikan menjadi sebuah program atau kebijakan oleh pemerintah desa sebagai program-program pemberdayaan masyarakat.

Bagan 6.3
Struktur kepengurusan BPD



Sumber : Kantor pemerintah Desa Depok

Seperti yang telah tergambar dalam bagan di atas mengenai struktur organisasi BPD. BPD memiliki struktur dan anggota yang sama seperti institusi lainnya. Diketahui oleh bapak Purwadi. Dan didampingi oleh bapak Bibit dengan sekretaris adalah bapak Nursidik. Sedangkan anggota yang lain adalah bapak Mariyanto, Sugito, Rani, Muyoto, Winarno dan Shoimin.

Menjalin komunikasi dengan BPD tidaklah sulit. Dengan persamaan misi dan tujuan kegiatan penelitian serta pendampingan ini yang hakikatnya adalah tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan rasa aman dengan bertambahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu kebencanaan di lingkungan mereka. Sehingga BPD dan peneliti saling bersinergi dalam kesuksesan semua kegiatan yang dilakukan selama di lapangan.

4. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Stakeholder yang juga fundamental dalam kegiatan ini adalah pihak BPDB kab. Trenggalek. Seluruh data spasial dan data dasar peta rawan bencana bersumber pada peta milik BPBD kab. Trenggalek. Dalam institusi yang dikepalai oleh Drs. Joko Rusianto, M.Si membantu peneliti dalam penyediaan data dan mengolah data lapangan menjadi data yang baru adalah tindakan yang tidak akan ada ruginya.

Faktor pengalaman dan keahlian dalam bidang kebencanaan benar-benar sangat dibutuhkan ketika dilapangan. Seluruh data kebencanaan Kabupaten Trenggalek disimpan dalam satu *database* bank data yang dikelola oleh Pusdalops BPBD Kab. Trenggalek. Sehingga jika memerlukan data-data kebencanaan dapat diakses dengan mudah di Pusdalops BPBD Kab. Trenggalek. Kampanye dan sosialisasi pengurangan

risiko bencana juga dilakukan oleh pihak BPBD Kab. Trenggalek, yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2017 di Aula kantor pemerintah desa. Pembicara dan narasumbernya adalah bapak Agung dan pak Yani. Dengan peserta tidak kurang dari 70 orang hadir dalam satu ruangan.

Gambar 6.7

Kampanye Desa tangguh bencana oleh BPBD Kab. Trenggalek



Sumber : Dokumentasi Peneliti

5. BABINSA

Sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Depok, Babinsa menjadi salah satu *stakeholder* motor penggerak dan pengorganisir masyarakat. Selain itu Babinsa juga menjadi salah satu motor mobilisasi aset sosial. Diantaranya adalah saat kegiatan kerja bakti yang juga dijadikan sebagai kegiatan zonasi daerah rawan dengan memberikan tanda rawan longsor sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Dengan memberikan tanda-tanda tersebut diharapkan kewaspadaan masyarakat meningkat sehingga sistem peringatan dini bahaya longsor dapat bekerja secara efektif.

Gambar 6.8

Bapak Wiyono Babinsa Desa Depok



Sumber : Dokumentasi Peneliti

6. Tenaga Kesehatan Desa

Dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana, peran serta semua pihak yang terkait juga menjadi sentral. Tidak terkecuali tenaga kesehatan di Desa Depok. Bu Katini selain menjadi seorang bidan di desa dan berdinias di puskesmas pembantu, beliau juga merupakan fasilitator antara peneliti dan masyarakat dalam melakukan inkulturasi dan bersama menganalisa kebiasaan-kebiasan masyarakat terkait isu kebencanaan. Menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan juga merupakan termasuk dalam pembuatan rencana kontijensi jika terjadi bencana di Desa Depok. Sehingga tenaga kesehatan jika diperlukan sewaktu-waktu dapat bekerja secara efektif sehingga kerugian dan dampak psikologis masyarakat dapat dikurangi.

Gambar 6.9

Bidan desa bersama peneliti dan masyarakat saat acara yasinan di dusun Soko



Sumber : dokumentasi peneliti

7. Perguruan tinggi/akademisi

Perguruan tinggi menjadi instansi yang memiliki teori, dan kerangka berpikir yang terstruktur agar kegiatan ini dapat dirangkai secara sistematis dan siap dipublikasi sebagai media perluasan skala gerakan. Jika pendampingan berhasil dan pendampingan gagal maka seluruhnya dapat menjadi bahan evaluasi bersama hingga ada perubahan kearah yang lebih baik di kemudian hari. Baik dari pihak masyarakat, peneliti dan dunia akademisi jika akan melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian ini tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan terakhir. Justru kegiatan penelitian ini membuka akses untuk penelitian selanjutnya.

Dibantu oleh seorang dosen lapangan dan dosen pembimbing penulisan hingga siap dipublikasikan melalui laporan akhir. Beberapa revisi di beberapa lokasi dan beberapa saran dan motivasi untuk melakukan kegiatan ini. Terkadang peneliti dalam waktu yang telah ditentukan sering mati langkah dan tidak tahu apa langkah yang selanjutnya dikerjakan. Bahkan saat menemukan kendala dalam penelitian dan

pendampingan ini peran dosen lapangan dan dosen pembimbing menjadi sangat bermanfaat dan kegiatan dapat berjalan tepat waktu.

G. Melakukan Aksi PRB

Daerah dengan kerawan bencana longsor adalah yang terletak di kaki bukit dan daerah dengan lereng tersusun oleh tanah mudah lepas dan padat pemukiman. Oleh karena itu masyarakat harus membangun kesiapsiagaan terhadap bencana longsor. Kesiapsiagaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Langkah membangun kesiapsiagaan masyarakat dengan upaya pengurangan risiko bencana adalah langkah strategis dalam pendampingan di Desa Depok. beberapa langkah dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB).

Untuk membangun kesadaran akan risiko bencana tanah longsor yang di lakukan dengan membangun sistem peringatan dini, penyiapan jalur evakuasi bila terjadi bencana, latihan simulasi bencana. Untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan Memahami potensi ancaman yang ada di daerah masing-masing, Memahami penyebab atau tanda-tanda akan terjadinya bencana, dan Memahami apa yang harus dipersiapkan dan yang harus dilakukan baik sebelum, pada saat dan sesudah bencana.⁶ Dan membentuk kelompok tangguh bencana untuk membantu mengkampanyekan gerakan Kesiapsiagaan diri, keluarga dan sekolah akan sangat membantu dalam mengurangi dampak bencana, baik kerugian harta maupun korban jiwa.

⁶ *Ibid*, hlm. 34.,

Untuk itu pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dengan landasan hukum UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. UU No. 24 tahun 2007 ini telah merubah paradigm penanganan bencana menjadi penanggulangan bencana yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya sebelum terjadinya bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada saat tanggap darurat, melainkan dilakukan sebelum (pra bencana), pada saat tanggap darurat dan setelah (pasca bencana)⁷.

Tindakan PRB dapat dilakukan jika ada penumbuhan pola pikir sadar terhadap ancaman bencana bagi masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana.⁸ Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Tanah longsor tidak membawa bencana sepanjang manusia yang ada di sekitar peristiwa mampu mengantisipasinya. Korban jiwa dan material dapat dihindari apabila setiap orang memiliki kompetensi dalam mengantisipasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pasal 33-38, dinyatakan, bahwa: Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi; prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Pada Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

⁷ Yukni Arifianti, "buku mengenal tanah longsor sebagai media pembelajaran bencana sejak dini", bulletin vulkanologi dan bencana geologi, volume 6 No. 3, hlm. 17.,

⁸ *Ibid*, hlm. 18.,

tahapan prabencana meliputi; dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Tabel 6.7

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk PRB

No.	Kegiatan		
	Menyelenggarakan pendidikan komunitas dalam RPB tanah longsor	Pembentukan kelompok/komunitas yang focus dalam upaya PRB di desa	advokasi agar pemerintah desa segera mengimplementasikan program tentang upaya PRB di desa
1.	kampanye dan sosialisasi PRB di masyarakat	mengidentifikasi kelompok masyarakat yang telah ada	menyusun dokumen rencana aksi komunitas
2.	membuat zonasi daerah rawan, jalur evakuasi dan titik kumpul bersama masyarakat	mengorganisir pembentukan kelompok/ komunitas yang focus dalam upaya PRB di Desa	mengupayakan kelompok siaga di desa berstatus legal dibawah naungan payung hukum pemerintah desa
3.	pembuatan media informasi untuk peringatan dini berupa rambu-rambu dll	Menyusun struktur organisasi, visi misi, kelompok kerja, penanggung jawab dan sumber dana	Koordinasi lumbung bencana dan dana siaga sebagai upaya PRB di desa.

Sumber : Hasil FGD bersama masyarakat

Upaya pengurangan risiko bencana berupa : 1. Memperkecil ancaman kawasan; 2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan 3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

H. Melakukan Evaluasi dan Refleksi

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di

berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekuensinya dapat lebih banyak daripada evaluasi. Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator atau target yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (lessons learned) dari pelaksanaan program.

Gambar 6.10

Kegiatan Evaluasi Dalam Rangkaian Kegiatan Penguatan Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok



Sumber : Dokumentasi peneliti

Untuk program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, evaluasi secara khusus diharapkan dapat menjawab:

1. Apakah program telah memberikan kontribusi untuk pengurangan risiko?
2. Apakah program telah berkontribusi pada mitigasi ancaman?
3. Apakah program dapat menghilangkan atau mengurangi kerentanan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan warga masyarakat maupun aparat pemerintah di berbagai tingkat?
4. Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya setempat untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana?
5. Apakah ada komitmen dari pemerintah Desa, Kelurahan, Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam keberlanjutan program?

Beberapa informasi kebencanaan yang telah dihimpun bersama masyarakat antara lain tentang karakteristik ancaman yang meliputi; faktor pemicu, unsur-unsur yang mengancam, tipe, kecepatan dan jarak ancaman, tanda-tanda, frekuensi, periode, durasi, akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana serta akar penyebab bencana. Oleh karena itu masyarakat selalu dilibatkan dalam mengidentifikasi permasalahan bencana di wilayahnya sendiri.

Temuan di lapangan menyebutkan bahwa bencana yang mengancam di Desa Depok yang paling tinggi adalah bencana tanah longsor. Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

Jenis longsoran yang sering terjadi di Desa Depok adalah longsoran jenis longsoran translasi, longsoran rotasi dan rayapan tanah. Longsoran translasi adalah ber-geraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Sedangkan Longsoran rotasi adalah bergerak-nya massatanah dan batuan pada bidanggelincir berbentuk cekung. Dan Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu

transformasikan menjadi data spasial. Peta rawan bencana berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat wilayah mana saja yang rawan terjadi bencana. Media informasi yang lain adalah menghimpun informasi-informasi yang dapat merubah paradig dan kesadaran masyarakat mengenai fenomena kebencanaan yang terjadi di wilayah mereka. Sebut saja dengan mencetak dan menyebarluaskan stiker dan brosur mengenai informasi kebencanaan.

Isinya adalah sebagai panduan dalam mencegah hingga penanggulangan yang sebaiknya dilakukan saat terjadi bencana. Serta beberapa rekomendasi untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan di fase pra-tanggap-pasca bencana. Beberapa diantaranya diterbitkan oleh stakeholder terkait dalam hal ini adalah pihak BPBD Kab. Trenggalek dan diantara lainnya dapat diakses di situs milik BNPB. Di dalam melakukan pengurangan risiko bencana sendiri terdapat beberapa prinsip yang dapat diikuti yaitu: Pengerahan sumber daya difokuskan pada kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan perencanaan, Sinergi dengan berbagai komponen pemerintahan, Pelibatan semua pemangku kepentingan dan Prioritas Penanggulangan Bencana.

Tidak semua kegiatan di atas dapat dilakukan. Namun beberapa kegiatan yang telah dilakukan bersama masyarakat untuk membuat informasi kebencanaan antara lain dengan membuat peta rawan bencana, menentukan jalur evakuasi bersama masyarakat, serta zonasi dan peletakan rambu rawan longsor di wilayah yang dianggap rawan terjadi longsor.

1. Membuat Peta Rawan Bencana

Pembuatan peta rawan bencana tanah longsor ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang daerah yang rawan terjadi

apabila terus menerus digencarkan maka tidak ada yang tidak mungkin paradigma masyarakat memandang bencana menjadi berubah.

Perubahan dalam hal ini meliputi perspektif masyarakat yang sebelumnya menganggap isu bencana tidak penting isu ekonomi dapat berubah dengan masyarakat yang melek informasi kebencanaan. Pandangan lainnya yakni perilaku masyarakat yang selama ini jika terjadi bencana bergantung pada *stakeholder* lain dapat berubah, dengan menjadi berdaya sehingga jika terjadi bencana masyarakat dapat mengatasinya secara mandiri bahkan bila terdapat kerugian harta dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Sehingga ketangguhan masyarakat menjadi fokus utama dan fundamental.

Langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan kampanye di Desa Depok ini dimulai dari diskusi bersama masyarakat dan perangkat desa. Lalu berkomunikasi pada BPBD Kab. Trenggalek sebagai *stakeholder* tenaga ahli. Setelah konsultasi berjalan, kemudian penentuan tanggal, tempat dan peserta kampanye.

Kampanye ini bertujuan sebagai media atau forum komunikasi penyampaian informasi kebencanaan yang sebelumnya telah dihimpun, baik oleh BPBD Kab. Trenggalek maupun hasil penelitian di lapangan bersama masyarakat sendiri. Tidak kurang dari 70 orang sebagai peserta kampanye. Selain kampanye, kegiatan ini juga merupakan kegiatan diskusi dua arah antara pemateri dan peserta diskusi. Dapat pula dikatakan sebagai kegiatan *sharing* dan tanya jawab mengenai masalah kebencanaan yang ada di lingkungan masing-masing peserta kampanye.

Sebagai pemateri adalah perwakilan BPBD Kab. Trenggalek, bapak Agoeng dan bapak Yani. Sedangkan peserta kampanye adalah seluruh ketua RT, Ketua RW,

mendorong masyarakat setelah tahu, masyarakat harus mampu melakukan perubahannya kemudian mau berubah adalah keniscayaan.

C. Membentuk Kelompok Tangguh Bencana

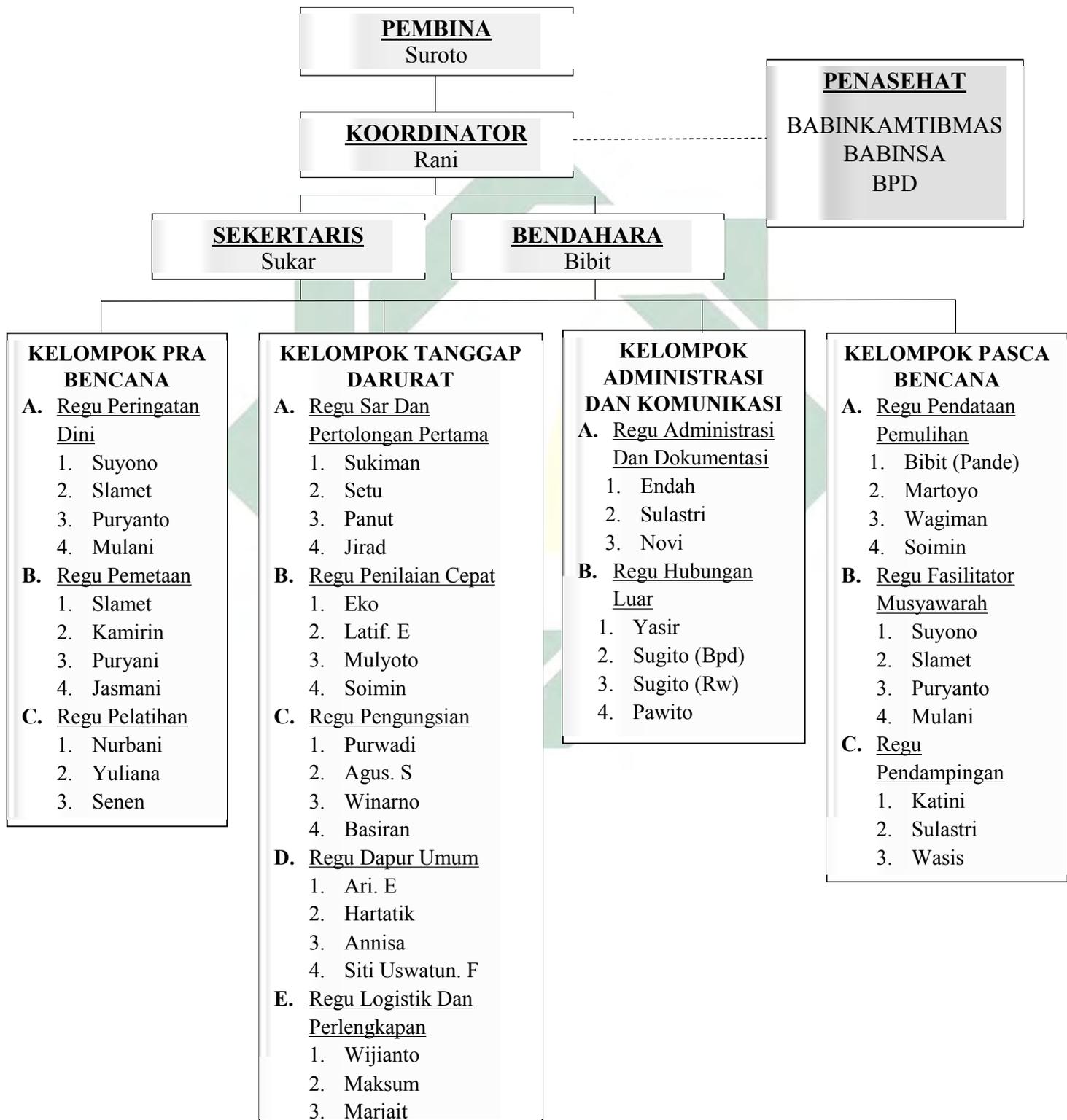
Beberapa kegiatan PRB memang difokuskan untuk kelompok arisan RT di Desa Depok. Dengan harapan kelompok ini menjadi motor gerakan skala lokal. Namun, untuk lebih mengefektifkan peran dan dari kelompok arisan ini maka, jajaran pemerintah desa memutuskan untuk menjadikan kelompok legal dibawah naungan pemerintah desa. Lebih mudah dikontrol dan mendapat komando langsung dari pemerintah desa.

Dalam membentuk kelompok tangguh bencana Desa Depok terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah Kelompok yang terbentuk pada tanggal 23 Januari 2017 ini belum memiliki program kerja yang dibentuk secara partisipatif. Bagaimana mengimplementasikan upaya PRB dalam sebuah program jika kelompok tersebut belum memiliki visi misi dan arah dalam berorganisasi yang kuat. Kuat dalam hal ini adalah didukung dengan sarana, prasarna dan sokongan dana.

Proses penyusunan struktur dan anggota serta tugas pokok dan fungsi beberapa orang dalam kelompok arisan RT di rubah sesuai kebutuhan. Beberapa alasan diantaranya adalah faktor usia dan gender yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok kelompok yang kemudian disebut sebagai kelompok tangguh bencana Desa Depok ini. Berikut ini adalah struktur dan susunan anggota kelompok tangguh bencana Desa Depok;

Bagan 7.1

Struktur Pengurus Dan Anggota Kelompok Tangguh Desa Depok



Seperti dalam bagan di atas, pembina kelompok tangguh bencana Desa Depok adalah Kepala Desa Depok, yaitu bapak Suroto. Memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara desa siaga bencana. Sedangkan penasehat, Koordinator kelompok, sekretaris, bendahara dan masing-masing regu memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut;

Tabel 7.2

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Tangguh Desa Depok

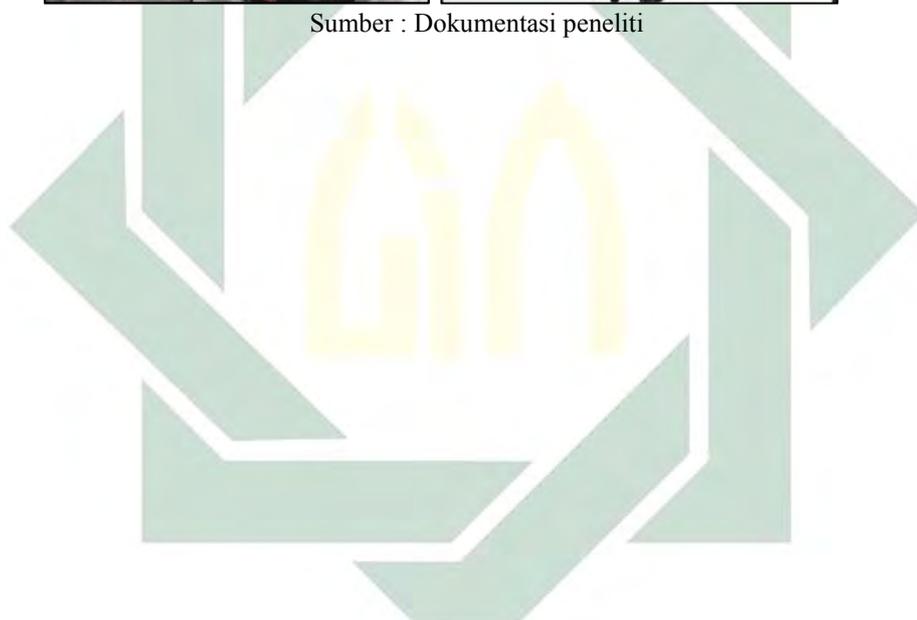
No.	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1.	Pembina	Sebagai penyelenggara Desa Siaga Bencana
2.	Penasehat	Sebagai pemberi arahan dan masukan untuk menciptakan Desa Siaga Bencana
3.	Koordinator	Ketua pelaksana Desa Siaga Bencana
4.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas surat-menyurat Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok
5.	Bendahara	Bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan keuangan Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok
6.	Regu Peringatan Dini	Melakukan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>) dan Menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan atau kegiatan penyadaran masyarakat lainnya tentang bahaya bencana
7.	Regu Pemetaan	Melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal, termasuk jalur evaluasi
8.	Regu Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan latihan-latihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait. 2. Menyelenggarakan simulasi/gladi bencana sesuai jenis dan kerawanan bencananya secara periodik sesuai kebutuhan.
9.	Regu Pertolongan Pertama	Melakukan tindakan upaya awal penanggulangan bencana apabila terdapat korban jiwa secara cepat
10.	Regu SAR	Melakukan tindakan upaya awal penanggulangan bencana apabila terdapat korban jiwa hilang dan belum di temukan secara cepat
11.	Regu Penilaian Cepat	Melakukan penilaian korban jiwa, harta dan kerugian yang di taksir saat terjadi bencana

Gambar 7.14

Koordinator dan Logo Kelompok Tangguh Bencana Desa Depok



Sumber : Dokumentasi peneliti



Sebelum melakukan penelitian dan pendampingan di Desa Depok, peneliti merasa sangat ironi mendengar kisah peneliti bencana asal Jepang melakukan penelitian di kaki gunung merapi di Jogjakarta. Si peneliti Jepang hanya menggunakan masyarakat lokal sebagai objek penelitian di samping gunung merapi itu sendiri. Kedatangan peneliti Jepang dalam kisah diatas disambut baik dan ramah oleh masyarakat lokal, malah cenderung lebih gegap gempita larut dalam *euphoria* daerahnya menjadi lokasi penelitian "*bule asia*". Harapan-harapan mereka tentang hasil penelitian yang di dapatkan setelah penelitian itu dapat merubah sedikit banyak tatanan dan kondisi sosial masyarakat pasca gempa merapi silam. Menghapus duka dan menimbulkan keceriaan di masa yang akan datang bagi si masyarakat.

Namun, penelitian pun berakhir. Sikap keramahan dan kontribusi masyarakat dalam penggalian data yang dibutuhkan peneliti Jepang layaknya bertepuk sebelah tangan. Hasil penelitian Jepang hanya menjadi sebuah "produk dagangan" (*komoditas*) alat simulasi gempa dan sudah di patenkan olehnya. Tanpa ada timbal balik pada masyarakat. Mendengarnya sudah ironi. Dan jangan sampai ini terulang kembali.

Belajar dari kisah peneliti Jepang dan masyarakat kaki gunung merapi membuat peneliti berhati-hati dalam melakukan riset dan pendampingan di Desa Depok. Jangan sampai hasil akhir dari penelitian ini hanya di nikmati oleh salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Isu bencana memang belum banyak orang yang *concern* seperti halnya isu ekonomi dan keagamaan. Membangun perubahan paradigm masyarakat tentang kebencanaan memang tidak mudah dan

butuh *effort*. Setidaknya langkah awal sudah dimulai tinggal menapak selangkah demi selangkah menuju Indonesia tangguh bencana. Tagline diatas memang terdengar sangat jauh. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karenanya harus dimulai dari sekarang, dan dari level paling kecil.

Bencana yang seperti kita ketahui bersama masih dianggap sebagai kesalahan alam yang murka kepada manusia, namun lebih jauh dari itu sikap masyarakat juga masih sering *responsive* dalam menghadapi bencana. Padahal bencana tidak mungkin di hilangkan karena berbagai factor. Diantaranya factor geografis, factor iklim dan cuaca, factor aktifitas manusia dan factor-faktor pemicu lainnya. Namun, dampak kerugian dari adanya bencana dapat dikurangi dengan merubah paradigma masyarakat yang *responsive* menjadi *preventif*.

Salah satu indicator telah berubahnya paradigma masyarakat yang *responsive* menjadi *preventif* adalah melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga apabila terjadi bencana di wilayahnya dapat di reduksi kerugian yang di timbulkan. Seperti korban jiwa, kerugian harta dan rusaknya infrastruktur hingga dampak psikologis dan rusaknya tatanan sosial di masyarakat dapat di tekan.

Pengurangan risiko bencana bukan sekali dua kali kegiatan dan dilakukan oleh beberapa pihak saja. Dukungan seluruh *stakeholder* dan masyarakat harus di galakan secara dari hal terkecil, terus menerus, massif dan berkelanjutan. Pandangan mengenai bencana alam pun mengalami pergeseran, dimana dulu bencana hanya ditanggulangi sebagai bentuk responsif terhadap bencana, sedangkan saat ini penanggulangan bencana lebih ditekankan sebagai bentuk

Proses perubahan paradigma masyarakat mengenai isu bencana tidak serta merta dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang mudah dan murah. Banyak sekali hambatan dan tantangan yang terjadi dilapangan. Seperti faktor kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat, jika kebiasaan tersebut baik maka tidak masalah. Yang terjadi di lapangan beberapa kebiasaan masyarakat tersebut salah dan dapat membahayakan kehidupan mereka dikemudian hari. Contoh nyatanya adalah kebiasaan membuang sampah di sungai atau di lahan belakang rumah (*jumbleng*), dalam teori bencana alam tanah longsor terjadi salah satu penyebabnya adalah beban di atas lereng yang tidak dapat ditahan. Seperti adanya kolam atau tumpukan sampah sehingga air dapat terserap ke dalam tanah, sehingga pada titik jenuh aliran air dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang membuat tanah di atasnya dapat bergerak menjadi longsor.

Sehingga proses penyadaran yang dilakukan kepada masyarakat harus menampilkan fakta-fakta dan kondisi di lingkungan mereka. Kemudian menariknya menjadi pembandingan dengan teori ideal yang ada. Proses berpikir (dialektika tesis-antitesis – sintetis) masyarakat terbangun. Menjadikan masyarakat tahu terlebih dahulu, kemudian mampu mengolah dan mengklasifikasi fakta-fakta mana yang benar dan mana yang salah sehingga solusi atau jawaban dari permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat terutama isu bencana menjadi mudah diselesaikan.

B. PRB Sebagai Upaya Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat

Dalam penelitian dan pendampingan ini dilakukan, sebelumnya peneliti telah memaparkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan pendampingan dengan masyarakat Desa Depok, Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek ini menggunakan

penanggulangan bencana; 3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana; 4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perubahan yang paling penting adalah perilaku preventif dari masyarakat. Sebelumnya memang merespon bencana atau penanggulangan bencana memang penting dilakukan. Namun, lebih baik mencegah, mengurangi, mereduksi risiko dan ancaman bencana sehingga dampak dan kerugian yang akan dialami masyarakat tidak terlalu banyak.

Sedangkan Respon masyarakat terhadap bencana yang sebelumnya apatis/pragmatis, atau tidak acuh berubah menjadi masyarakat yang kritis/ tidak terfragmentasi. Maksudnya adalah masyarakat dapat memetakan masalah yang ada di lingkungannya sendiri, menentukan langkah strategis penyelesaian masalah kemudian mengimplementasikan menjadi suatu aksi demi perubahan kearah yang lebih baik. Hal tersebut terbangun ketika ada rencana tindak lanjut atau keberlanjutan program untuk pengurangan kebergantungan masyarakat pada pihak luar. Solusinya dengan membentuk kelompok tangguh, Langkah strategis pendayagunaan anggaran untuk PRB dan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang informasi.

C. PRB Sebagai Hasil Dakwah Pada Masyarakat

Transformasi yang terakhir adalah masyarakat dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari adanya bencana yang diturunkan Allah di lingkungannya. Dan untuk selanjutnya dapat menyikapi atau merespon dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Dan apabila terjadi bencana

4. Untuk menahan erosi sungai dan longsoran tebing jembatan disarankan dibuat tiang-tiang pancang
5. Air permukaan pada lereng bagian atas (run off) perlu dialirkan dengan saluran kedap hingga langsung masuk ke sungai, agar tidak menggenangi dan masuk ke dalam batuan/tanah pada lereng
6. Perlu penanaman tanaman keras berakar kuat dan dalam pada lereng, agar akar tanaman dapat menahan lereng
7. Disarankan tidak beraktivitas di sekitar lokasi bencana terutama pada waktu hujan
8. Masyarakat sekitar bencana perlu waspada terutama pada waktu terjadi hujan deras dan apabila hujan berlangsung lama disarankan segera mengungsi ke lokasi yang aman
9. Perlu di lakukan sosialisasi dan penjelasan terhadap daerah rawan bencana gerakan tanah (tanah longsor) di wilayah tersebut oleh pemerintah setempat

